



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI  
DENGAN KEPALA SKK MIGAS**

- Tahun Sidang : 2022-2023  
Masa Persidangan : II  
Rapat ke- : 8 (delapan)  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Rabu, 16 November 2022  
Waktu : Pukul 10.41 WIB s.d.15.19 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara 1, Jakarta  
Ketua Rapat : Sugeng Suparwoto (F- Nasdem / Ketua Komisi VII DPR RI).  
Sekretaris Rapat : Dra. Nanik Herry Murti/Kabagset. Komisi VII DPR RI  
Acara : 1. Laporan Kinerja Industri Hulu Migas hingga Oktober 2022.  
2. Ketertarikan Investor pada PSC *cost recovery* dan *gross split*.  
3. Perkembangan dan Prognosa Investasi dan Eksplorasi Tahun 2022.  
4. Lain - lain  
Hadir : 35 orang anggota hadir dari 51 orang Anggota Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

**A. Anggota DPR RI:**

**PIMPINAN :**

1. Sugeng Suparwoto/F-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI
2. Dony Maryadi Oekon/F.PDI Perjuangan/ Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
3. Maman Abdurrahman, S.T./F-Golkar/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.

4. H. Eddy Soeparno, S.H, M.H./F-PAN/Wakil Ketua  
Komisi VII DPR RI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:**

6 orang anggota dari 10 anggota:

1. H. Yulian Gunhar, S.H, M.H.
2. H. Naszirul Falah Amru, S.E.
3. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
4. Paramitha Widya Kusuma, S.E.
5. Ribka Tjiptaning Ploretariyati
6. Bambang DH.

**2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:**

6 orang anggota dari 7 anggota:

1. Ir. H. M. Ridwan Hisyam
2. Drs. Mukhtarudin
3. Ir. Lamhot Sinaga
4. Bambang Hermanto, S.E.
5. Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A, M.Sc.
6. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

**3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:**

6 orang anggota dari 6 anggota:

1. Moreno Soeprapto
2. R. Wulansari
3. Ramson Siagian
4. Katherine A. Oendoen.
5. Iwan Kurniawan, S.H.
6. H. Nurzahedi, S.E.

**4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:**

3 orang anggota dari 4 anggota:

1. Ina Elisabeth Kobak, S.T.
2. Arkanata Akram, S.T., B.E. (Hons) M.Eng.Sc.
3. Rico Sia

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

3 orang anggota dari 4 anggota:

1. H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si.
2. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E, M.M.
3. H. Marwan Ja'far

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. Muhammad Nasir
2. Rusda Mahmud
3. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Dr. H. Mulyanto, M. Eng.
2. Dipl. Ing Hj. Diah Nurwitasari, MI.Pol.

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

2 orang anggota dari 3 anggota:

1. H. Asman Abnur, S.E., M.Si.
2. H. Nasril Bahar, S.E.

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

0 orang anggota dari 1 anggota:

**B. PEMERINTAH/UNDANGAN**

1. Dwi Sutjipto (Kepala SKK Migas)

**JALANNYA RAPAT :**

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, mari kita mulai Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan Kepala Satuan Kerja Khusus atau SKK Minyak dan Gas atau SKK Migas.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semuanya,  
Om swastiastu,  
Namo buddhaya,  
Salam kebajikan.*

Yang kami hormati Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, baik yang hadir langsung di forum ini, ruangan ini maupun yang melalui virtual, Yang kami hormati Pimpinan, ini hadir lengkap *Insyallah* masih di samping, ruang samping dan Sudah barang tentu yang kami hormati Kepala SKK Migas dan jajarannya, serta hadirin sekalian.

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita semuanya dapat bertemu mendengarkan rapat dengar pendapat dan dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih atas perhatian, serta kehadiran Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII DPR RI serta undangan yang hadir dalam acara Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.

Hal lain juga kita bersyukur G20 kemarin dibuka dengan lancar dan inshaa Allah mudah-mudahan sebagaimana temanya juga *energy transition* dan sangat berkaitan betul tentang persiapan bangsa ini ke depan dalam hal ini. Saya kira forum hari ini juga menjadi sangat-sangat relevan.



Bapak-Ibu sekalian.

Sesuai dengan undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023, pada hari ini Komisi VII DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala SKK Migas, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dengan agenda, sebagai berikut:

1. Laporan kinerja industri hulu migas hingga Oktober 2022,
2. Ketertarikan investor pada *Production Sharing Contract* (SPC) dengan *cost recovery* dan/atau *gross split*,
3. Perkembangan dan Prognosa investasi dan eksplorasi tahun 2022,
4. Lain - lain

Bapak-Ibu sekalian.

Berdasarkan data dari sekretariat, bahwa Anggota Komisi VII DPR RI yang hadir dalam rapat ini berjumlah 28 anggota dari 51 anggota dan terdiri dari 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yakni Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup.

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan protocol kesehatan, mohon maaf. Oleh karena itu, pimpinan, meminta persetujuan anggota agar rapat ini dilaksanakan sesuai ketentuan protokol kesehatan dan bersifat terbuka, bagaimana Bapak-Ibu sekalian disetujui?

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, atas persetujuan anggota dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT:SETUJU)**  
**(KETOK PALU 1 KALI)**  
**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.41 WIB)**

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian.

Sebelum kita mulai rapat kita minta persetujuan bahwa rapat ini akan selesai kurang lebih pukul 13.00 WIB atau 2 jam setelah rapat ini dimulai dan apabila nanti diperlukan perpanjangan, atau *scoring*, atau bentuk apapun atas persetujuan forum bisa dilakukan, setuju Bapak-Ibu sekalian ya?

**(RAPAT:SETUJU)**  
**(KETOK PALU 1 KALI)**

Baiklah, Bapak dan Ibu yang kami hormati.



Harga minyak dunia mengalami kenaikan di awal tahun 2022 dan bertahan pada level yang tinggi hingga saat ini. Kegiatan pengeboran sumur, pengembangan mohon maaf, kegiatan pengeboran sumur pengembangan sebagai salah satu aktivitas utama hulu migas pada triwulan ke-3 2022 sudah melampaui capaian di tahun 2021. Hingga triwulan ketiga produksi minyak mencapai 613.000 barel per hari, sedangkan *lifting*, apa ini kok minyak mencapai. Hingga triwulan ketiga produksi minyak mencapai 613.000 barel per hari, sedangkan *lifting* minyak mencapai 610.000 barel per hari, ini coba dikoreksi agak janggal, salah ketik ini.

Ya, intinya demikian memang rata-rata 610.000 kurang lebih, nah untuk salur gas sebesar 5 miliar 353 juta kaki kubik per hari atau mmscfd. Dengan total *lifting* migas mencapai sekitar 1,562 juta barel setara minyak, ini untuk gas ya atau sekitar 80% dari target 2022.

Bapak-Ibu sekalian.

Kegiatan pengeboran sumur hingga, maaf, sumur pengembangan hingga triwulan ketiga 2022 mencapai 545 sumur atau sudah sekitar 171% jika dibandingkan dengan capaian triwulan ketiga 2021 dan mencapai 116% jika dibandingkan dengan capaian hingga akhir tahun 2021.

Sementara realisasi investasi hingga triwulan ketiga 2022 mencapai 7,7 miliar US dolar dari target 13,2 miliar US dolar atau menjadi investasi hulu migas terbesar secara rata-rata dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, sejak tahun 2016.

Dalam peningkatan produksi minyak, maaf, dalam rangka peningkatan produksi minyak dan gas, SKK Migas membangun investasi dan program kerja yang lebih masif dan agresif, agar dapat mencapai target di tahun 2022. Jika aktivitas hulu migas tinggi maka akan berdampak positif bagi upaya menjaga *entry* level produksi minyak dan gas.

Sinergi dengan data-data tersebut, maka pada kesempatan ini SKK Migas juga menyampaikan capaian *cost recovery* kegiatan hulu migas pada triwulan ketiga tahun ini dan kontribusi sektor hulu migas terhadap penerimaan negara tahun 2022 ini.

Untuk itu pada Rapat Dengar Pendapat hari ini Komisi VII DPR RI ingin memperoleh informasi dan penjelasan dari Kepala SKK Migas sebagaimana agenda yang telah ditentukan di atas.

Bapak-Ibu sekalian.

Untuk efektifnya waktu, kami persilakan kepada Kepala SKK Migas untuk menyampaikan pemaparannya dan nanti tidak tertutup kemungkinan dilengkapi dari segenap jajaran yang lain.

Baiklah, dipersilakan yang terhormat Pak Kepala SKK Migas.



**KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**

Terima kasih, Bapak Ketua.

Dan yang kami hormati Bapak Ketua dan seluruh Pimpinan, serta Bapak-Ibu yang kami hormati para Anggota DPR Komisi VII yang hadir pada RDP pada pagi hari ini.

Terima kasih atas kesempatannya untuk kami bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan operasi pengelolaan hulu migas di Indonesia saat ini dan sebelum itu, izinkan kami meskipun mungkin sudah banyak yang kenal, untuk kembali lagi apa namanya menyampaikan bahwa bersama saya. Di sebelah kiri saya adalah Pak Fataryani Wakil Kepala SKK Migas, kemudian sebelah kiri beliau adalah Pak Taslim Sekretaris SKK Migas, kemudian Pak Budi Jatmiko Deputy Dukungan Bisnis dan sebelah kirinya adalah Bu Desti Pelaksana Harian untuk Deputy Keuangan dan Komunikasi karena Deputy Keuangan dan Komunikasi sedang dinas keluar. Sebelah kanan saya Pak Beni Deputy Perencanaan, kemudian Pak Yulius Deputy Operasi dan Pak Murdo Pengawas Internal.

Terima kasih Bapak-Ibu sekalian.

Untuk sebagai bahan presentasi kami pada pagi hari ini kami masuk ke dalam 4 kelompok, yang pertama pendahuluan. Di pendahuluan ini kami akan ingin meng-*update* Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat tentang kondisi global yang terkait dengan *oil and gas* ini.

Yang kedua, seperti dalam agenda undangan kinerja hulu migas. Yang ketiga, mengenai ketertarikan investor pada *cost recovery* PSI *cost recovery* ataupun PSE *gross split*. Kemudian yang keempat, perkembangan dan *prognosa* investasi di bidang eksplorasi di tahun 2022.

Kami akan langsung pada kelompok pertama atau pertama mengenai situasi global.

Bapak-Ibu sekalian.

Ada 3 tiga atau sebenarnya tiga hal penting yang terkait dengan situasi global ini. Yang pertama, kondisi geopolitik yang dimana berdampak kepada tingginya inflasi saat ini yang kemudian memunculkan kekhawatiran akan krisis ekonomi global, yang dipicu oleh konflik Rusia-Ukraina, kemudian disrupsi suplai energi dan energi saat ini, khususnya ke Eropa, sehingga infrastruktur belum siap dan terjadi kesulitan suplai. Sehingga menciptakan kenaikan harga dan dampaknya kepada inflasi.

Kemudian yang kedua adalah isu energi transisi *going to the net zero emission*. Masing-masing negara punya target dan ini berdampak kepada tumbuhnya *renewable* energi buat Indonesia ini sebenarnya tidak ada masalah. Kemudian yang hanya pada ketertarikan investasi karena beberapa perusahaan *oil and gas* besar mulai mengembangkan portofolio energi baru

terbarukan. Lembaga *financing* juga apa namanya agak terhambat akibat kebutuhan untuk investasi di *renewable* energi ini.

Dan kemudian tentu saja tambahan investasi bagi *oil and gas*, yakni CCS dan CCUS yang berdampak pada Capex setiap *project* di *oil and gas* menjadi lebih tinggi. Dan di energi transisi memunculkan isu baru mengenai prospek LNG yang menjadi cukup baik karena LNG dipakai atau gas dipakai sebagai energi transisi selama itu, sehingga untuk proyek-proyek yang apa, yang berdasarkan atau memproduksi gas atau LNG sesungguhnya prospeknya bagus untuk ke depan.

Dan yang berikutnya sebenarnya adalah terkait dengan pandemi, yang di beberapa negara khususnya di Cina masih belum 100% pulih. Sehingga dampaknya *begitu* pulih, ekonomi pulih maka konsumsi di sana akan meningkat dan tentu saja menjadi apa pertanyaan disuplai lagi. Oleh karenanya, ada lima aspek yang bisa mempengaruhi termasuk harga minyak dunia ke depan.

Sempat turun harga minyak ketika US Amerika meningkatkan produksinya dan mengeluarkan stoknya, tetapi kemudian OPEC plus apa namanya justru meng-*cut* produksinya, sehingga *price* menjadi apa namanya meningkat lagi atau tertahan di level yang masih tinggi.

Kemudian Russian *oil export* juga berdampak, ini masih menjadi analisa seberapa besar nanti kebijakan ini. Kemudian beberapa intervensi dari *government*, *sanction* dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah posisi Cina's *demand* yang saat ini belum pulih, yang ke depan akan apa namanya kemudian menjadi tinggi kembali.

Ini yang akan menjadi analisa yang dinamis untuk melihat bagaimana perkembangan harga minyak dunia, sehingga dari HIS markit menganalisa bentuk perkembangan harga ke depan adalah seperti ini, ada yang potensi namanya *falling oil supply*. Di mana dalam posisi tinggi, kemudian *base*-nya ini *average*-nya adalah *inborn*, yang di sini kalau kita lihat bergerak 90-an.

#### **F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Interupsi, Pak Ketua.

Pak Kepala SKK Migas, kan ini tadi bicara transisi energi BBM kurang *begitu* dipakai lagi tapi gas iya. Tapi itu Blok Masela nggak ada kelanjutannya tuh, kita di-*cipoain* aja kalau Bahasa Betawi zaman saya dulu waktu masih muda. Enggak ada, dibuat dong hitungannya kapan bisa itu bergerak, itu strategi situ yang paling strategis, kita nggak masuk ke 2060 *net-zero emission*. Ini maksud saya yang pemikiran strategi seperti itu, jangan hal yang normatif aja Pak Ketua Rapat.

*Gitu* aja Pak Kepala SKK Migas, itu nanti walaupun tidak hari ini, kapan bisa dipaparkan itu gimana solusinya, karena saya juga *nggak* ada ini diam-



diam aja, karena saya ikuti juga perkembangannya Pak, padahal itu sangat potensial aturannya tadi untuk mendorong transisi energi.

Terima kasih Pak Ketua, Pak Kepala SKK Migas.

**KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**

Terima kasih, Pak Ramson.

Kami juga lampirkan, kami juga sertakan dalam bahan kami nanti dua hal, IDD dan di Masela.

Terima kasih.

Berkaitan dengan investasi karena nanti kita akan melaporkan mengenai investasi, kami laporkan Pak Ketua dan Bapak-Ibu semua bahwa harga minyak memang apa namanya sempat melompat tinggi, tetapi reinvestasi di hulu migas secara global hanya meningkat sekitar 5%, mengapa demikian? Karena perusahaan-perusahaan masih melihat bahwa harga minyak yang tinggi itu hanyalah sementara.

Oleh karena itu, mereka lebih mementingkan untuk mengamankan posisi cash dalam menghadapi krisis dan ancaman krisis global. Di sini kelihatan bahwa mereka menggunakan dana yang diperolehnya untuk membayar hutang dan perbaikan *cash investor*. Jadi kami ingin mencatat di sini bahwa secara global investasi di hulu migas hanya naik 5%, nanti kami *compare* kepada bagaimana di Indonesia.

Kami langsung masuk kepada kinerja, agenda pertama kinerja hulu migas di Indonesia. Kinerja pertama, kami laporkan mengenai *reserve replacement ratio*, bagaimana kita mengganti apa namanya cadangan terhadap apa yang kita ambil.

Di sini kami laporkan secara lengkap bahwa *alhamdulillah* 5 tahun berturut-turut kita masih bisa mempertahankan *reserve replacement ratio* kita di atas 100%. Kemudian memang ada hal yang bisa kami sampaikan bahwa cadangan untuk gas bertambah lebih banyak, sedangkan minyak memang kita belum bisa mengganti secara penuh. Sehingga ini harapannya memang konversi gas ke, konversi minyak ke gas sangat dibutuhkan untuk ketahanan energi masa depan.

Kami lanjutkan dengan bahan persentasi mengenai *reserve replacement* tahun 2022, yang *outlook* kami adalah ke-186,5%, ini sudah 110% sampai dengan akhir Oktober dengan temuan-temuan cadangan seperti, atau tambahan cadangan dari berbagai proyek yang ada di sini. Yang total proyek-proyek yang kita setuju *plan of development*-nya dan menambah cadangan ini sebesar 12,7 *billion* US dolar di tahun 2022 ini sampai dengan Oktober dan ini memberikan penambahan cadangan sebesar 637 juta barel oil ekuivalen saat ini.



Sedangkan aktivitas untuk hulu migas seperti juga tadi Bapak Ketua, Bapak Pimpinan juga sudah sempat menyingung bahwa memang kita sudah melihat aktivitas yang sangat masif, khususnya di eksploitasi, di pengembangan. Untuk pengeboran dari tahun yang lalu 480 sumur, tahun ini *Inshaallah outlook* kita di 800, hingga hampir 2 apa namanya cukup besar.

Jadi dan kemudian demikian juga *workover, wellservis* meningkat cukup tajam. Pengembangan ini menjadi perhatian dari seluruh K3S karena ini yang langsung berdampak kepada tambahan produksi. Eksplorasi yang sebagaimana yang dalam agenda nanti menjadi perhatian kita, tetapi pengeborannya sudah lebih baik daripada tahun yang lalu.

Kami lanjutkan ini adalah gambaran bahwa kecuali 2020 karena pandemi, kita memang sudah terus tumbuh ini jumlah pengeboran kita tiap tahun. Yang terakhir paling rendah adalah di tahun 2017, kemudian terus dan 2020 juga apa kena, lalu meningkat tahun yang lalu 80 sampai dengan Oktober 616 kita tahun ini dan *outlook* kita adalah 800 dari target 790.

Belum begitu berdampak kepada produksi 2022 Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu semua, karena kegiatan pengeborannya banyak baru dimulai di pertengahan tahun, yang mestinya ini kita sudah agendakan di Januari-Februari, mudah-mudahan ke depan bisa diperbaiki untuk bisa memanfaatkan awal tahun.

Kami sedang menyusun WTMB dan 2023 rencana pengeboran kita *alhamdulillah* saat ini sudah teridentifikasi sebesar 1.063 sumur, jadi ini sudah cukup meningkat tajam dan kami bisa sampaikan di sini saat-saat ini kami sudah mulai merasakan kesulitan untuk mendapatkan rig.

Lanjut, dari kegiatan tersebut Bapak-Ibu sekalian, kami melaporkan bahwa untuk WK-WK yang secara aktif melaksanakan kegiatan *drilling* kita sudah bisa melihat bagaimana kita bisa ngerem apa namanya *decline*-nya sehingga menjadi seperti gambar tersebut. Di tahun-tahun ini kita sudah lebih flat ada problem-problem di *facility*, sempat mau naik tapi ada problem difasilitas sehingga kita apa namanya masih tertahan. Ini kami akan laporkan lebih lanjut.

Demikian juga di *monitoring* kami dan memang kenaikan yang sudah terjadi di WK-WK yang sudah ada pengeboran cukup aktif, ini masih termakan *decline*-nya EMCL. EMCL memiliki potensi untuk segera mengangkat kembali dengan proyek yang namanya *infill drilling* dan eksplorasi di clastic ke *structure* yang ada di Banyuurip dan juga optimalisasi di Kedungkeris, ini yang sedang dalam proses sedang berjalan untuk proyek-proyek tersebut.

Kami juga sampaikan di sini sepanjang 2022 dari bulan ke bulan, *the next*-nya ini adalah ini naik dan turun, yang turun, muncul turun di April karena pipa dari lapangan Kedungkeris di Banyuurip ini terkena longsor *landslide*, sehingga di *stop* produksi dari Kedungkeris.



Kita kehilangan sekitar 10 sampai 11 ribu barel per hari, tapi kemudian mulai *re-recover* di Bulan Juni dan sekarang dari Kedungkeris malah meningkat dari 10.000 menjadi 18.000.

Kemudian di bulan Juli kita terkena problem yang agak panjang ini mengenai bocor pipa di Oses dan WMO dan di September kena satu lagi *offloading hose* yang bocor di EMCL. *Offloading* ini adalah dari kapal Gagak Rimang untuk *offload* ke kapal pengangkut, ini ada bocor di sana sehingga ini harus diperbaiki.

Inilah yang menyebabkan terjadi penurunan-penurunan terus Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu sekalian, yang kami kemudian memunculkan kegiatan satu lagi adalah audit *maintenance*. Kalau di gas *relatively* problem-problem beberapa kejadian yang sangat besar terjadi di *unplanned shutdown* di PV, banyak di PV *next*-nya tetapi potensi ke depan ini untuk gas cukup bagus karena sekarang Jambaran Tiung Biru sudah mulai *onstream* sampai Desember *Inshaallah* akan jadi 100% nambah produksi 190 juta barel, 1 juta kubik per hari.

Kemudian saat ini juga sudah mulai *onstream* lapangan yang HCML, jadi nanti sampai Desember ada 2 lapangan akan *onstream* nambahi kira-kira 120 mm kubik per hari dan awal tahun depan juga akan *onstream* satu *project* lagi di HCML dan Train 3 akan *onstream Inshaallah* di Maret 2023.

Ini adalah update mengenai audit kinerja pemeliharaan yang kami harus lakukan, beberapa rekomendasi sudah kita sampaikan ke K3S untuk bisa memperbaiki. Sehingga kalau kita lihat sejak awal tahun ini beberapa data mengenai bagaimana *up and down* muncul ya di produksi *lifting* kita. Kita sudah mencoba untuk bekerja lebih banyak, lebih aktif, kegiatannya lebih masif memang masih apa namanya harus memperbaiki *facility* ke depan.

Kemudian untuk proyek-proyek tadi strategis nasional, kami laporkan mengenai IDD. IDD pemegang ininya adalah Chevron, jadi IDD ini ada 844 mm kubik per hari rencana produksinya cukup besar dan operator sekarang adalah Chevron. Chevron sudah memutuskan untuk apa namanya *off* dari proyek IDD ini dan sekarang sudah ada calon penggantinya dan saat ini sedang proses untuk perubahan tersebut dan dijanjikan akhir tahun ini akan terjadi perubahan *operatorship* dan proyek IDD sudah mulai bisa jalan sejak tahun depan.

Jambaran Tiung Biru sudah selesai, sedang jalan. Tangguh Train 3 ditargetkan selesai di Q1 2023 yang akan datang. Abadi Masela ini yang Bapak-Ibu sekalian, yang Pak Ramson tadi sampaikan, kami *update* mungkin selesai, mungkin kalau ada *slide* khusus yang mengenai Abadi Masela ini tolong.

#### **F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Interupsi Pak Ketua, soalnya inikan pemerintahan Jokowi 2 tahun lagi udah mau ini apa namanya berlalu *gitu*, tapi itu udah 7 tahun bahas, bahas itu. Maksud saya SKK harus punya strategi yang tepat *gitu*.



Terima kasih, Pak Ketua.

**KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**

Terima kasih Pak Ramson.

Jadi ketika Shell mau melepas maka hak pertama sebenarnya adalah ke Intake dulu, sudah ditawarkan ke Intake ada waktu yang dipakai untuk negosiasi antara Intake dengan Shell, yang kemudian apa namanya negosiasi ini gagal, sehingga Intake tidak ngambil. Ketika Intake sudah apa namanya tidak *deal* terhadap apa namanya ambil alih ini, maka Shell melakukan *bidding* tender kepada secara terbuka, ada beberapa yang waktu itu tertarik, masuk mempelajari dan sebagainya.

Tapi ini saya kira kami meng-*update* saja posisi terakhir, Intake mencoba untuk membangun kolaborasi strategis dengan Pertamina sebagaimana yang diarahkan oleh pemerintah waktu itu. Dan Pertamina sedang melakukan data *room study* dan dijanjikan oleh Pertamina untuk November ini menyampaikan namanya *non-binding offer* kepada Shell, kami sedang menunggu itu. Di saat yang sama Petronas juga tertarik untuk masuk dan kalau memungkinkan bisa kerjasama dengan Pertamina dalam hal apa pergantian Shell ini.

Ini perkembangan terakhir tentang Shell, beberapa waktu yang lalu memang karena kondisinya masih belum stabil, harga gas juga rendah waktu itu memang tidak banyak yang bisa menggantikan, disamping harganya yang mahal. Kami sampaikan saja bahwa harganya mahal, itu *case* pertama untuk Abadi Masela.

Yang berikutnya, hal yang berikutnya adalah tuntutan untuk operator untuk memasang *carbon capture storage*, yang diharapkan kita bisa menghasilkan *blue* LNG. Dengan *blue* LNG diharapkan harga LNG-nya akan bisa lebih mahal disamping memang tuntutan terhadap *net-zero emission* tadi yang tadi kami juga singgung di awal. Dan studi mengenai *blue ammonia*, mengenai studi Abadi CCS sudah selesai dan sudah disampaikan di bulan Agustus yang lalu, yang nanti akan mempengaruhi tentu saja POD-nya.

Oleh karena itu, jadwal yang terakhir yang kami dapat dari diskusi dengan Intake, kami terus memaksa Intake juga dan juga memaksa Shell untuk segera tidak mensandera *project* ini. Bahasa kami kepada Shell terus terang demikian juga pada Intake pada waktu itu, jangan mensandera *project* ini karena strategi masing-masing korporasi.

*Nah* oleh karena itu, diharapkan nanti di bulan Desember mereka berjanji untuk memasukkan POD yang revisi karena masuknya CCS tadi. Tentu saja nanti sejalan dengan itu diharapkan juga partner yang barunya juga sudah muncul karena Intake *nggak* mungkin menyampaikan POD revisi ini tanpa tahu siapa partner yang barunya.



Ini kami laporkan perkembangan mengenai Abadi Masela, kami sesungguhnya memanggil mereka tiap minggu untuk mendiskusikan apa yang dilakukan, tetapi tentu saja Pak Ramson juga tahu kita juga memiliki keterbatasan-keterbatasan atas aspek legal dan sebagainya yang juga kami juga tidak bisa sembarangan untuk membuat mereka ini sebagai investor besar tetap bisa berlanjut.

Saya kira ini yang kami bisa sampaikan untuk kelompok, lebih lanjut lagi seperti tadi juga sampaikan mengenai *cost recovery so far* masih apa namanya terkendali seperti batasan yang ada, upaya efisiensi kita terus lanjutkan dan terlihat di sini bahwa investasi di eksplorasi *development* meskipun belum terlalu besar tapi sudah mulai ada peningkatan dibanding dengan tahun yang lalu yang waktu itu hanya 1,1 *Inshaallah* tahun ini menjadi 1,8 ini warna hijau.

Untuk *production cost* kami terus berusaha untuk meningkatkan efisiensi di bidang ini karena disinilah yang harus berjuang, kalau tahun 2021 4,4 *million*, mudah-mudahan tahun ini bisa di bawah jadi 3,8 *outlook* kami. Yang lain-lain itu hanya dampak saja depresiasi dan lain sebagainya.

Kemudian untuk penerimaan negara yang merupakan bagian daripada *revenue* ini kami sampaikan bahwa *Inshaallah revenue* hulu migas di tahun 2022 akan mencapai 39,1 *billion* US dolar meningkat cukup tajam dibanding dengan tahun 2021 yang 29,8 *billion* US dolar.

Daripadanya maka penerimaan negara adalah yang warna merah, yang kita, *outlook* kita adalah 17,5 *billion* US dolar dan *Inshaallah* itu berada di atas, baik APBN maupun APBNP.

Investasi hulu migas tahun 2021 10,9 *billion* US dolar sampai dengan Oktober, kami laporkan mungkin sedikit mengkoreksi apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan, Pak Ketua yakni kita sudah 9,2 *billion* US dolar sampai dengan dan Oktober dan *outlook* kita di 12,1 *billion* US dolar dan berarti ini ada kenaikan sekitar 20% dan berarti lebih tinggi dari rata-rata dunia yang hanya 5% untuk kenaikan investasi di 2022.

Kemudian ketertarikan investor pada PSC kami laporkan Bapak-Ibu sekalian, ini adalah data tender WK yang tahun 2018 sampai dengan 2020 hanya menawarkan kontrak skema *gross split*. Kemudian melalui Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2021 yang menganut fleksibilitas skema kontrak, yang dimana di sana boleh memilih *bidding ron* tahun 2018 dan 2019 hanya menawarkan, dengan skema kontrak *gross split* dan ini kita lihat bahwa *bidding*-nya kalau di tahun 2018 *bidding* 35 dan kemudian yang mendapat *awards*, jadi akan mendapat yang diputuskan hanya 9. Kemudian 2019 ada 13 *bidding*, 3 yang di *award*, tahun 2020 tidak ada, 2021 ada 16 *bidding*, kemudian 6 di-*award* dan tahun 2022 9 *bidding*, 3 di-*award*.

Perbandingan antara yang ikut *gross split* dan *cost recovery* seperti yang ada di halaman berikutnya. Sejak tahun 2018 terdapat 29 WK yang telah disetujui untuk menggunakan skema *gross split*, 22 WK *gross split* alih kelola



atau perpanjangan 4 WK perubahan dari *cost recovery* menjadi *gross split* dan 3 WK *gross split* yang baru.

Terdapat usulan perubahan skema dari *gross split* ke *cost recovery* untuk 3 WK dan padatahun 2021 paska fleksibilitas skema kontrak 2 WK alih kelola menggunakan *cost recovery*. Jadi saat ini juga apa namanya ada cukup banyak WK-WK yang *gross split* mengusulkan pindah ke *cost recovery*. Ini perkembangan dari ketertarikan investor terhadap *gross split* dan *cost recovery*.

Jadi kalau dan saat ini pun kita dalam penerapan *gross split* pun tidak apa namanya, tidak cukup kaku dengan *gross split* karena banyak WK-WK *gross split* yang saat ini terpaksa harus mendapatkan apa namanya diskresi untuk insentif terkait dengan keekonomian masing-masing lapangan untuk bisa beroperasi.

Jadi kita fleksibel juga dalam menerapkan *gross split* yang sekarang sedang berjalan, tetapi untuk WK-WK yang baru pada umumnya mereka memilih ke *cost recovery*. Kemudian berikutnya adalah mengenai perkembangan dan *prognosa* investasi bidang eksplorasi tahun 2022.

Bapak-Ibu sekalian.

Kami laporkan bahwa untuk 2022 realisasi aktivitas eksplorasi adalah 25 sumur eksplorasi, kemudian 1.044 km seismic 2D, 269 km<sup>2</sup> seismic 3D dan 7 kegiatan nonseismik.

Progres program tahun 2022 adalah *subvulcanic vibroseis progress* 100% 1.090 km di sepanjang Pulau Jawa. Kemudian Pseudo 3D *reprocessing progress* 96,8% dan diperkirakan Desember 2022 bisa tuntas. Survei Airborne FTG di 8 di Papua, Akimeugah seluas 60.440 M<sup>2</sup>, Bird's Head Bintuni seluas 45.580 Km<sup>2</sup>, kemudian Memberamo seluas 81 ribu Km<sup>2</sup> dan Kutai-Barito ini tambahan, untuk Kutai-Barito ini seluas 60.700 Km<sup>2</sup>.

Evaluasi hasil Mega survei ada 32.000 km<sup>2</sup>, 88 struktur dengan potensi 16 *billion* barel *oil* dan 63 TCF gas *inplace* untuk 50, ini hasil dari evaluasi kita terhadap kegiatan-kegiatan seismik tadi. 10 area yang *interest* sudah diidentifikasi dan kita terus berjualan ini untuk investasi, eksplorasi, eksploitasi ke depan.

Untuk MNK sedang mengembangkan strategi percepatan termasuk aturan-aturan pendukungnya yang saat ini sedang digarap di Kementerian ESDM dan *Inshaallah* tahun depan, awal tahun depan akan ada pengeboran untuk MNK di lapangan Rokan, Bapak-Ibu sekalian.

Kemudian investasi, eksplorasi di sepanjang 2012 sampai 2022 ini kami laporkan berikutnya, memang ini sempat tinggi eksplorasi dahulu, kemudian ini tahun berapa ini angkanya 1, 2, 3 bawahnya, yang 2014 ya yang satu ya. Kemudian turun dan di 3 tahun terakhir setelah agak *flat* mulai 3 tahun, 4 tahun dan kemudian meningkat menjadi naik 28% untuk tahun 2022 ini.

Lanjut, kegiatan ini kita terus galakkan, ini data detail saja. Tahun 2022 ini ada 6 sumur yang selesai yang program di 2021 ada 5 sumur *discovery*. Jadi *success ratio* adalah 83%, ini ada lapangan-lapangannya dari 6 sumur. Kemudian total penemuan sebanyak 334 juta barel ekuivalen, yakni terdiri dari 152 juta barel *oil* minyak dan 804 *billion* kubik gas.

Kemudian untuk sumur yang Tajak di 2022, status 1 November ada 25 sumur sudah di Tajak, 13 selesai, 1 sumur *core hole* dan 11 masih berjalan. Dari 9, ada 9 *discovery* dan *success story* adalah 69%, ini lebih baik karena berarti ini sudah mengambil lapangan-lapangan yang lebih berisiko dari 13 sumur, ini lapangannya dan kemudian total temuan *discovery*-nya ada 508 juta barel *oil* ekuivalen, yang terdiri dari 199 juta barel *oil* dan 177 *billion* kubik *feet* gas. Sehingga total temuan di tahun 2022 adalah 352 juta barel *oil* dan 2.600 atau 2,6 TCF gas.

Kami juga laporkan temuan yang menarik yakni di Andaman, di mana ini gambar Andamannya di atas Aceh. Di atas Aceh ada apa namanya Andaman 1, Andaman 2, Andaman kemudian ada *short* Andaman dan lapangan Krueng Mane ini kira-kira yang berada di sana dan kami laporkan untuk Andaman 2, itu ada apa namanya struktur Timpan 1 atau sumur Timpan 1 yang telah memberikan temuan yang dalam perhitungan kita kira-kira di struktur, salah satu struktur di Timpan 1 ini sekitar 1,7 TCF.

Sehingga kalau Andaman 2-nya ada 7 struktur, kita berharap temuan menjadi besar dan dengan Andaman-Andaman yang lain kita harapkan ini menjadi *play opener* untuk pengembangan lapangan lebih lanjut. Dan ini apabila sukses nanti ini sangat baik untuk menghidupkan kembali kilang LNG Arun, kita harapkan ke depan dan juga suplai gas ke, baik Sumatera maupun tembus ke Jawa, kalau nanti pipa Semangke-Dumai sudah bisa tersambung, jaraknya sudah *nggak* terlalu jauh lagi.

Kemudian kita terus dengan investor-investor *engagement* untuk eksplorasi ini kita terus jalankan, ada 23 *oil and gas company* yang tahun ini kita lakukan *engagement*, 8 *exploration*, kemudian diadakan dalam 8 *exploration* forum, 1 Geologi *Agency* yang kita, akan membantu kita, ada 2 internasional konsultan dan 1 *service company*.

Ini adalah kami tidak detailkan, tetapi ini *next*-nya adalah kandidat area untuk eksplorasi dan eksploitasi migas di Indonesia yang punya potensi, di sini ada data potensinya juga lengkap di data ini. Jadi dan posisi-posisinya juga apa namanya ada, lengkap di sini, termasuk yang Buton.

Yang untuk minyak potensinya ada di Buton, di mana di Papua yang selatan, ini ada beberapa lapangan-lapangan yang sudah teridentifikasi. Ada yang PONJ *interested* di sini, *bidding* Ron tahun 2022, kemudian ada yang *joint study*. Jadi yang *joint study* ini berarti sudah ada peminat yang melaksanakan *joint study*.



Saya kira demikian Bapak Ketua yang kami dapat presentasikan pada pagi hari ini sesuai dengan agenda, mohon arahan lebih lanjut dari Bapak dan Ibu sekalian Anggota DPR Komisi VII yang terhormat.

Terima kasih.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/ F-NASDEM/ KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Ada tambahan, kalau tidak nanti akan segera kita tanggapi.

Jadi demikian tadi memang bahasanya bahasa-bahasa teknis ya yang menyangkut tentang apa *gross split*, tentang PSC atau *Production Sharing Contract cost recovery* dan juga sejumlah tadi potensi cadangan yang baik dan sudah *proven* maupun masih dalam konteks eksplorasi dan *study*.

Saya kira ini yang terus-menerus kita dorong mengingat betapapun hari-hari ini kita memang cukup prihatin dengan terus turunnya *lifting* Pak Dwi dan SKK. Di sisi lain konsumsi BBM hari ini terus naik masih, meskipun ada upaya terus-menerus kita meningkatkan misalnya konsumsi BBM dikurangi dengan kendaraan listrik misalnya, tapi belum-belum sangat signifikan.

Bahkan sudah mencapai hampir 1,5 juta barel setiap harinya konsumsi, maka kita impor 850-an ribu barel per hari, hari-hari ini. Jadi ini menjadi sangat berat kita harus lihat betul karena pun juga meskipun ada kecenderungan turun tetapi ICP misalnya masih di angka 105 juga dan ini yang menjadi perhatian.

Sehingga kalau kita lihat dalam struktur APBN di tahun 2023 pun kita diperkirakan masih agak berat karena disediakan di APBN 2023 hanya 336 triliun, itu pun ada *carry over* dari APBN tahun 2022 160 triliun, karena 502 triliun itu hanya sampai bulan Oktober itu hanya 23 juta kiloliter untuk Pertamina dan untuk solar kurang lebih hanya 15 juta kiloliter atau 14 sekian juta itu.

Nah inilah problem-problem BBM yang sudah menjadi persoalan ekonomi yang sangat-sangat serius. Di sisi lain gas kita bersyukur untung ada gas, sehingga kita ada impor BBM tapi kita ekspor gas karena memang idealnya juga pemanfaatan gas yang lebih optimal, di mana membutuhkan infrastruktur.

Di Komisi VII sudah bersepakat salah satu infrastruktur yang strategis adalah setelah nyambungunya *South* Sumatra dan *West* Java, maka CISM menjadi sangat penting. Apalagi tadi disampaikan Jambaran Tiung biru akan segera upstream, maka dengan CISM Cirebon-Semarang dan sebagainya maka nyambung. Inshaa Allah Kawasan-kawasan industri yang memerlukan gas sebagaimana juga target *net-zero emission* menjadi bisa kita capai dengan membangun infrastruktur gas yang sangat ini.



Saya kira itu pengantar dari saya dan marilah Bapak-Ibu sekalian Komisi VII kita mulai saja mencermati apa yang disampaikan dengan, oleh Kepala SKK Migas. Mulai dari Partai PDIP Perjuangan, ada Pak Gunhar, dipersilakan yang terhormat atau Pak Raden Patih Gajah Mada.

**F-PDIP (H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang saya hormati, yang saya banggakan Pimpinan Komisi VII dan sahabat-sahabat Komisi VII,  
Yang saya hormati Bapak Kepala SKK Migas, Bapak para deputi yang hadir.

*Alhamdulillah* kita semuanya diberi sehat sehingga bisa kita melakukan rapat pada pagi hari ini.

Pak Kepala SKK, kalau kita bicara *lifting* turun itu kita bisa memahami suasana kebatinan dan keprihatinan kita, Pak. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya ingin tanyakan kepada Pak Kepala yaitu salah satu penyebabnya itu mungkin faktor alat-alat produksi yang sudah tua, yang umurnya itu sudah lebih dari 40 tahun dan alat-alat produksi ini 70% sudah tidak layak, karena untuk *life time* untuk alat ini paling cuma 25 tahun.

Hal-hal ini harus juga dipikirkan, apa yang harus dilakukan dan sudah dilakukan oleh Pak Kepala, itu satu pertanyaan saya, Pak.

Izin interaktif Ketua ya, itu yang sudah dilakukan apa saja Pak?

**KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**

Jadi terima kasih, kami untuk yang ya pertama untuk keseluruhan kami lakukan audit *maintenance*. Jadi kita *begini* dari audit nanti ada temuan ini kami sampaikan di halaman, halaman nomor 17. Jadi upaya mitigasi dengan melakukan audit kinerja pemeliharaan termasuk alat-alat tadi dan yang kedua yang mengenai kebocoran itu terjadi di pipa bawah laut di WK Oses ini dengan Pertamina karena memang pemegang operatornya adalah Pertamina dan juga ONWJ yang di utaranya Jakarta.

Kami sudah panggil mereka, sudah diskusi mengenai agenda perbaikannya, jadi yang kemarin ini cukup lama 2 bulanan itu yang di Oses itu pertama terjadi kebocoran, yang kedua apa namanya jadi apa namanya tersumbat, pipanya tersumbat dan kami kemudian diskusi dengan Pertamina mendesak dan akhirnya dilakukan upaya membawa dengan kapal sementara karena ini harus dibolongi, kemudian dibuat pipa baru untuk masuk di pipa yang baik, jadi pipa yang tersumbat itu kalau memang *nggak* bisa sudah dicoba



dengan air panas, segala macam, kalau memang *nggak* bisa dibuat yang baru tetapi kemudian kami mengupayakan untuk membawa dengan kapal-kapal sementara begitu untuk dibawa.

Dan janjinya kemarin Oktober harusnya sudah selesai, iya udah, udah selesai tetapi kan yang itu yang masalah yang dihadapi sehingga kita *losses* 8.000 barel *oil* per hari terjadi cukup panjang 2 bulan, tetapi pipa-pipa yang lain sudah sering teridentifikasi dan mereka sebenarnya sudah mengetahui, *nah* tinggal perbaikannya yang kami terus terang kemarin paksa dengan menunjukkan *losses* yang terjadi, kerugian yang terjadi dari *losses* itu terhadap biaya karena ini WK-WK yang *gross split*.

Jadi di *gross split* ini seringkali kemudian upaya untuk *maintenance* penggantian *replacement*-nya kami sampaikan memang ini keadaannya di lapangan demikian, mereka agak terlalu menahan biaya untuk itu tapi kami tunjukkan bahwa kalau tidak dilakukan, maka terjadi kebocoran ini *losses*-nya dan ini kan kerugian negara.

Jadi akhirnya sepakat bahwa manajemen PHE juga barusan yang baru kemarin, Pak Wiko, Pak Wiko juga sudah *commit* untuk mempercepat yang tadinya untuk Oses ini perbaikan sampai tahun 2026, kami sudah mendesak diperpendek hingga 2024 akhir. Jadi ini yang kami dan demikian juga ONWJ sama persis ini karena pipa itu.

#### **F-PDIP (H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E.):**

Baik, terima kasih.

Terus kalau ini Pak, kalau Bapak tadi menyampaikan ada ladang-ladang minyak yang mengalami penurunan itu yang paling mendasar itu yang paling parah itu di daerah mana Pak, di ladang minyak mana Pak?

#### **KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**

Sekarang Banyuurip, karena banyuurip sudah mencapai *peak*-nya dan kemudian ya tentu saja kalau tidak ada hal lain yang dilakukan dan di sana tidak ada tambahan ngebor maka dia akan *decline*. Jadi Banyuurip itu udah dalam posisi *decline* dan Banyuurip kapasitasnya besar, jadi *decline*-nya meskipun *even* itu misalnya 4%, tapi kan volumenya besar memakan tambahan-tambahan dari lapangan yang lain.

Jangka pendek ini yang diharapkan akan bisa membantu adalah mengolah yang kita sebut proyeknya adalah *untreated* gas, kenapa? Karena gas yang harus dimasukkan sudah sangat besar, sehingga itu sudah melampaui izin PLO-nya, *nah* ini oleh karena itu kita sembari juga ENCL mulai masuk di bisnis gas itu di-*treated* Pak, gas ini di-*treated* sehingga yang gas pipanya yang baik akan dijual dan yang dimasukkan ke untuk *lifting*, jadi di Banyurip itu sudah mulai masuk untuk memompa gas masuk *reservoir* untuk mengangkat minyak Pak. Jadi *lifting* sehingga penurunan tadi bisa ditahan, itu proyek yang pertama.



Yang kedua, sekarang terus meningkatkan dari lapanganan Kedung Keris waktu tahun, awal tahun yang lalu masih sekitar 10.000 ya tahun ini, awal tahun ini sekarang sudah 18.000 dan ini terus ditingkat, diusahakan untuk bisa masuk di 20.000 ya Pak Yulis ya.

Kemudian berikutnya adalah *infill drilling*, ada 5 pengeboran yang ini akan sangat meningkatkan produksi karena menambahi cadangan sekitar 60 juta barel *oil*, 60 jutaan. Dan kemudian yang kedua, yang bersamaan dengan itu tahun depan ini akan ada pengeboran untuk ada lapisan baru di sana namanya klastik. *Nah* ini klastik ini kita belum bisa tambahannya, tapi diperkirakan cukup besar karena tentu saja nanti hasil pengeboran ini, ini yang di Banyuurip.

Nah oleh karena itu, mudah-mudahan ini dengan semua tadi Exxon pun juga menyampaikan, saya bilang bahwa Rokan itu sekarang sudah mulai agak naik pada saat Pertamina masuk itu di sekitar 150.000 sekarang sudah naik ke 165-an, 165.000 udah naik dan saya bilang sama Exxon sebentar lagi disusul sama Rokan, mereka pun bertekad "*we don't to be number two*".

Nah ini kami senang dengan Pimpinan Exxon MCL sekarang dan mereka akan coba berusaha naik dan sekarang mendekati 170.000, jadi ini kami pacu yang 2 ini yang besar ini. Ini 2 yang besar ini harusnya betul menjadi andalan kita, itu Pak.

#### **F-PDIP (H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E.):**

Saya nanti atas izin Pimpinan, minta WPNB-nya untuk Banyuurip Pak ya kuartal 1, 2, 3.

Terus yang ada lagi Pak pertanyaan saya, tadi Bapak mengatakan bahwa untuk mempercepat termasuk Rokan tadi Pak. Saya belum melihat adanya proses pengadaan untuk kegiatan operasi itu ditingkatkan Pak, untuk di Rokan khususnya Pak, karena *drilling program* di PHR itu tahun ini itu juga tidak sesuai, Pak. Jadi kalau kita bicara ingin mempercepat, mempercepat ya harus dikukan itu. Izin Pak Kepala, itu memang harus dilakukan.

Yang keempat, saya juga ingin menanyakan investor itu tertarik ke kita itu mungkin ada tapi tidak sebanyak yang kita inginkan, tidak sebanyak yang kita gambarkan. Banyak kendala-kendala yang kita hadapi Pak, bagaimana juga investor itu pasti juga tergantung dengan fiskal lah ya yang lebih fleksibel.

Nah Bapak juga kalau bicara fiskal yang lebih fleksibel juga, saya pikir belum bisa masuk lebih detail dan oleh karena itu saya juga mengharapkan Pimpinan Komisi VII, teman-teman untuk di kesimpulan nanti juga harus dimasukkan untuk RUU Migas segera dilakukan, maksimalnya masa sidang ke depan itu harus sudah masuk, karena sekali lagi kalau kita hanya bicara sekadar teori, teori dan teori ya nggak akan jalan Pak, *wong* undang-undangnya *nggak* jelas.

Kita mau kepastian hukum seperti apa, investor juga *nggak* akan tertarik, investor juga bisa aja sekarang misalkan menggunakan *gross split*, jalan iya kan, kita langsung eksplor, *nggak* keluar minyaknya Pak KPK Pak. Ini juga harus menjadikan sebuah catatan, maka Undang-Undang Migas ini sangat perlu untuk segera dibahas di Komisi VII setidaknya persidangan bulan depan, persidangan yang selanjutnya.

Itu saja mungkin yang saya sampaikan, saya jangan sampai lupa Pak untuk WPNP-nya Banyu Urip kuartal 1, 2, 3 saya ingin melihat datanya.

Terima kasih.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Dari Fraksi PDI Perjuangan Perjuangan Gus Falah.

Dilanjutkan Fraksi Partai Golkar, ada Mbak Roro, terlambat atau tepat biasanya.

**F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI., B.A., M.Sc.):**

Terima kasih, Pak Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim,*  
*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati Pak Sugeng, Pak Maman dan seluruh Anggota yang saya banggakan,  
Dalam hal ini juga mitra kerja kami Pak Kepala SKK Migas dan seluruh jajarannya yang hadir pada kesempatan hari ini.

Saya ada 2 pertanyaan, yang pertama berkaitan dengan *slide* nomor 10. Di situ disampaikan bahwasanya adanya persaingan *gitu* ya antara sektor ataupun fosil energi, energi fosil dan juga *renewables* dalam menarik investasi. Kita menyadari semua ini karena memang ada sebuah momentum juga akan terjadinya transisi energi bukan hanya di negara Indonesia, tapi di seluruh dunia, *gitu*. Maka oleh karena itu, untuk kita meningkatkan aktivitas hulu Migas kita perlu diiringi dengan, ini tercatat juga tadi di *slide* nomor 10 saya ingat, diiringi dengan teknologi ataupun CCUS teknologi.

*Nah*, pertanyaan saya adalah mengenai bagaimana progres daripada setiap K3S yang selama ini juga dalam pantauan SKK Migas *gitu* ya dalam penerapan teknologi tersebut *gitu*, progresnya seperti apa. Lalu kemudian teknologi yang digunakan itu juga dari mana, kalau bisa itu ada mungkin bisa

tertulis nanti bisa disampaikan juga secara langsung *gitu* agar kita mengetahui K3S mana saja yang selama ini sudah melakukan inovasi yang pada dasarnya juga dibutuhkan *gitu* dalam rangka bagaimana kita dapat bertransisi.

Mengingat bahwa memang pada dasarnya negara Indonesia ini kan kaya segala resource *gitu*, kita mungkin lebih beruntung dibandingkan negara-negara lainnya di mana fosil energi kita masih kaya, tapi disamping itu *renewable* energi juga sangat amat kayak *gitu* kan. Jadi dalam proses bertransisi tentu CCUS teknologi ini sangat amat butuh kita *amplify* agar dapat berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon.

Lalu kemudian yang kedua di *slide* nomor 9, kami apresiasi ya Pak Kepala *reserve replacement ratio* di tahun 2022 dengan target 100% itu sudah mencapai hingga, saya *enggak* tahu yang bener mana ya 186% atau 110% saat ini.

**KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**

Yang sampai dengan Oktober 110%, *outlook* akhir tahun 186%.

**F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI., B.A., M.Sc.):**

Jadi kami apresiasi karena mengingat juga kita ada target yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan saya mengenai 1 juta barel per *day* ya di tahun 2030. *Nah* maka catatan selanjutnya adalah karena memang pada dasarnya kita kan masih jauh dari target itu *gitu* ya, walaupun *reserve replacement ratio* itu sudah notabene bagus.

Oleh karena itu, saya juga dapat informasi bahwasanya untuk mencapai 1 juta barel per *day* itu dibutuhkan investasi sebesar 160 miliar US dolar. Kita bisa mungkin asumsi kalau setiap tahunnya 16 miliar US dolar atau berdasarkan tadi paparannya kalau tahun ini sendiri itu ditargetkan 13,2 miliar US dolar, namun pencapaiannya di kisaran 9,2 miliar US dolar.

Maka yang saya ingin tanyakan adalah kendala apa saja sih yang selama ini dialami dari segi investasinya *gitu*, penghambat terbesarnya itu apa karena saat ini kita juga mempunyai momentum untuk menarik investasi, apalagi sebagai tuan rumah G20 kita ada *working group* untuk *energy transition*, banyak sekali yang kita bahas di ranah *working group* itu di mana kesempatan tersendiri untuk kita berkolaborasi dan juga apa namanya bekerja sama dengan negara-negara tertentu *gitu*. *Nah* tolong disampaikan kendala terbesarnya untuk negara Indonesia itu apa dan jalan keluar yang harus kita tempuh itu seperti apa.

Sekian dari saya, terima kasih Pak Ketua.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**



*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

*Carbon capture storage* dengan jadi isu kemarin, Joe Bidden komitmen untuk membantu dekarbonisasi, lantas tanda tangan antara Exxon dengan Pertamina dalam konteks itu, ini lumayan besar. Dan ternyata betul kalau CO2 bisa di-*capture* maka juga bisa untuk *injection* untuk karena sumur-sumur tua kita CO2 *injection* kan, ini Pak Wakil Kepala pasti hafal bagaimana untuk EOR *gitu*.

Saya kira ini satu dan lain halnya termasuk PLTU batubara itu bisa di-*capture* bisa untuk EOR. Memang jenis-jenis minyak tertentu dan hanya bisa dengan CO2, artinya tidak semua juga jenis-jenis minyak yang bisa dengan CO2, ada yang bisa dengan surfaktan, ada *batarflat* dan sebagainya dan sebagainya.

Baiklah, dilanjutkan Gerinda, oh ada Bung Moreno, dipersilakan.

**F-GERINDRA (MORENO SOEPRAPTO):**

Terima kasih Ketua, Pimpinan yang saya hormati.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang saya hormati Anggota Komisi VII yang hadir secara fisik maupun *virtual*, Yang saya hormati Pak Dwi Kepala SKK dan beserta jajarannya.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Mohon maaf sebentar ya sebelum, saya kebetulan ada tugas khusus, akan dipimpin selanjutnya oleh Pak Maman Abdurrahman.

**F-GERINDRA (MORENO SOEPRAPTO):**

Bisa lanjut Pak?

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T/F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Dilanjut Pak Moreno.

**F-GERINDRA (MORENO SOEPRAPTO):**

Terima kasih, Pak Maman.

Pak Kepala SKK tadi sempat disampaikan dan disinggung juga sama pendahulu Ibu Roro. Saya rasa, saya mengapresiasi dari paparan Pak Kepala SKK Migas tapi perlu saya ingatkan juga bahwa beberapa kali kami rapat di sini terbuka, tertutup, setengah tutup, setengah buka bahwa *road map* untuk 1 juta



dolar itu Pak, 1 juta barel per hari itu yang menjadi parameter kami, menjadi acuan, itu.

Kalau kita tarik mundur dengan di luar pandemi, endemi, tapi semuanya *on the track* kita bisa menuai hasil dari per hari ini ICP yang lagi bagus. Kalau seandainya kita melihat *outlook* bukan 1 tahun ke depan sampai beberapa tahun ke depan per hari ini ketarikannya kita masih jauh dari harapan, saya rasa kita bersama ini mesti memikirkan rumahnya dulu, Pak.

Apakah SKK Migas ini perlu diperkuat ataupun perlu dilebur sekalian dengan ESDM, saya tanyakan ke Bapak, kenapa? Karena RUU Migas ini saya rasa udah kita coba dorong beberapa kali menjadi pemikiran kita bersama. Apakah perlu ada regulasi ini ataupun secara teknis saja yang kita perlu perbaiki untuk mempercepat dari target kita bersama yang telah kita sepakati berapa kali kita ketok, betul ya.

Nah saya kembalikan ke Pak Kepala SKK Migas, SKK ini dalam satu rumah yang kita tahu sebagai mandornya mengatur wilayah kerja, nah sampai sejauhmana sekarang ini masih jauh dari harapan, terutama untuk mencapai 1 juta barel. Nah itu mungkin dari saya karena beberapa paparan Bapak tadi saya sedikit terlambat Pimpinan, hanya kami menanyakan bagaimana ke depan dengan 1 juta barel ini.

Apakah RUU Migas masih perlu atau secara teknis saja diperbaiki dari mulai perencanaan, lelangnya, sampai dengan yang tadi disebut sama Gus Falah beberapa alat-alat yang sudah tua itu diperbaiki. Kita yakin bisa mengajar mencapai 1 juta barel, tapi kalau mungkin perlu ada perbaikan di SKK Migas ya *monggo*, kita momentum ini kita mungkin sebelum 2024 mesti dikebut *gitu*.

Terima kasih, itu dari saya.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Sebelumnya saya mohon izin, palu sidang saya ambil alih, saya jadi supir tembak Pak, jadi supir utamanya lagi dapat panggilan mau dipakai Pak, dipakai sama Ketua Umum Nasdem jadi perlu untuk. Jadi memang kita ini Pak, kalau yang memanggil Ketua Umum atau Ketua Fraksi, hatta itu di depan ada Presiden Jokowi juga pasti putar balik Pak, itu lain urusannya. Jadi mohon izin saya ambil alih.

Terima kasih Pak Moreno atas tanggapan dan masukannya.

Selanjutnya saya pikir tidak usah kita antri per partai aja, *monggo* aja nanti kita acak aja. Jadi enggak usah berurutan berdasarkan partai paling



tinggi, paling besar, paling tengah, jadi silakan saja kalau memang forum ada yang mau angkat tangan nanti saya persilahkan.

Selanjutnya mungkin yang pertama *ladies first* dulu, Bu silakan Bu mainkan Bu.

**F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh teman-teman Komisi VII, juga Pak Kepala SKK Migas beserta seluruh jajarannya.

Terima kasih Pak atas paparannya.

Ada beberapa hal yang kami ingin dalam lebih jauh ya Pak, yang pertama saya menyambung apa yang disampaikan oleh Mbak Roro tadi terkait dengan paparan di *slide 9* ya, tentang *reserve replacement ratio*. Tentu bahwa rasio ini di atas 100% adalah sesuatu hal yang baik dan positif, tapi kami mengharapkan bahwa angka diatas 100% ini bukan menjadi sebuah kebanggaan saja, tetapi ini harus kemudian betul-betul didorong dan diwujudkan dalam peningkatan eksploitasi untuk meningkatkan *lifting*.

Ini terkait dengan *lifting* migas kita yang dalam pencapaiannya selama ini belum berhasil kita penuh *gitu* Pak ya. Jadi bukan apa ya, ini bagus nih cadangannya, *ratio*-nya diatas 100% tapi harus dari situ harus berubah *gitu*, harus terdorong untuk menjadi eksploitasi untuk meningkatkan *lifting*.

*Nah*, ini juga nyambung Pak dengan apa yang digambarkan di *slide 11, 12 dan juga 18* nantinya, di mana disampaikan bahwa aktivitas hulu migas ini sangat dilakukan secara masif dan agresif. Tapi pada kenyataannya *outlook*-nya tetap tidak sesuai target *lifting* Pak, jadi kebanggaan dengan masif dan agresifnya ini menurut saya masih harus apa ya, ya tertahan *gitu* karena pada kenyataannya target *lifting* migasnya masih belum tercapai. *Nah* ini yang perlu menurut, berarti menurut kami kurang masif dan kurang agresif itu untuk bisa betul-betul mencapai kepada target *lifting* migas.

Kemudian di *slide 15-16* Pak ya ketika kita berbicara tentang *loss production opportunity*. *Loss production opportunity* ini kalau dilihat ini lumayan banyak Pak ya, tentu saya yakin memang tidak ada dari kita yang apa ya merencanakan ataupun berharap bahwa itu terjadi, tetapi secara umum peristiwa-peristiwa yang tidak terduga ini dalam tanda kutip terduga *gitu* ya, bahwa ada kemungkinan-kemungkinan peristiwa-peristiwa yang tidak terduga.

*Nah* bagaimana cara kita mengurangi Pak *gitu*, supaya jangan sampai terlalu sering ini pipa bocor *gitu* ya, atau kerugian akibat *land slide* misalnya, itukan kontur geografis dari pipa-pipa ini kan sudah bisa kita prediksi lah *gitu*



ya. Nah antisipasti-antisipasi apa yang sudah dilakukan agar kita juga bisa mengurangi, terutama *unplanned shutdown*, karena kan begitu *shutdown* pasti ini sebuah proses yang tidak sebentar, ketika *shutdown* ini *nggak kayak* kita nyalain lampu kamar *gitu* ya, nyala mati, nyala mati, tapi pasti ini sebuah proses yang panjang dan kerugiannya bisa jadi sangat besar.

Saya berharap bahwa dilakukan upaya-upaya yang sungguh serius untuk memitigasi akan potensi-potensi dari *loss production opportunity* ini, Pak.

Yang selanjutnya tentang investasi tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Roro, terkait capaian investasi yang baru sampai 72% ya sampai dengan bulan Oktober ini dan Desember *nih* kan sebentar lagi Pak *gitu* ya. Ini sejauhmana optimisme memang target investasi akan tercapai dalam apa namanya akhir tahun ya, menjelang akhir ini yang tinggal sebentar lagi.

Yang terakhir Pak Dwi terkait dengan masalah di *slide 25* ini ya saya lihat, bagaimana tentang penawaran kontrak ya. kita lihat bahwa di sini rata-rata investor itu senang dengan skema *cost recovery* dibandingkan dengan skema *gross split gitu*. Padahal kalau *gross split* itu kan kita bisa lebih mengatur *gitu* ya, kurang lebih seperti itu.

Dengan *cost recovery* ini kami punya kekhawatiran, ini kalau kita tidak mampu mengendalikan atau tidak mampu berperan, atau dalam negosiasi atau apapun juga kita tidak punya posisi yang sangat kuat, maka nanti ini bisa menggerus penerimaan negara kalau kita tidak punya kemampuan untuk, atau lemah kemampuan kita di dalam pengendaliannya ini nanti bahkan *cost recovery* ini bisa menggerus dari penerimaan negara.

Oleh karena itu, kami berharap ini ada penguatan peran kalau memang ternyata kontrak tersebut diambil dengan pola *cost recovery* dibandingkan dengan *gross split*.

Itu saja dari saya Pimpinan, terima kasih.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Ya, terima kasih banyak Bu Diah.

Saya coba mengutip sedikit masalah *reserve replacement ratio*, kalau misalnya diangka 100%, artinya berarti seharusnya terkait *reserve* kita aman kan *gitu*. Cuma memang betul Pak, kalau nyambung juga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Moreno kalau tadi kita, dulu kita wacananya *reserve* kita kecil *gitu* ya ataupun tidak ada cadangan temuan baru, tetapi sekarang kalau berdasarkan pemaparan Bapak ya relatif trennya positif lah naik.



Cuma memang yang selalu menjadi ukuran kita kan sebenarnya produksi kan, apapun ceritanya Pak, DPR RI, pemerintah, segala macamnya lah pasti akan melihatnya ukurannya adalah produksi.

*Nah* ini memang menjadi bahan diskusi di internal Komisi VII, kebetulan kita lagi mau mempersiapkan RUU Migas. Selalu memang tarik-menariknya ini adalah terkait RUU Migasnya adalah *positioning* kelembagaan SKK Migas. Ada satu pertanyaan besar sederhana kalau dikaitkan dengan produksi yang trennya menurun, bahkan tidak bertahan kalau kita bicara fakta data saja.

Apakah SKK Migas menjadi relevan atau masih dibutuhkan, nah ini memang menjadi pertanyaan. Jadi saya pikir itu juga perlu menjadi ini elaborasi agar ini bisa menjadi bahan diskusi kita bersama, nyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Moreno. Nanti saya pikir itu perlu menjadi respon khusus dari Pak Kepala karena ini dikaitkan dengan upaya kita untuk mendorong RUU Migas ini *gitu* Pak.

Selanjutnya silakan Pak Habib Pak Rico Sia, masuk ke Pak Nasril.

Silakan Pak Rico.

#### **F-NASDEM (RICO SIA):**

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Saya langsung ke Pak SKK, tadi secara nasional semuanya kurang lebihnya hampir sama yang ingin saya sampaikan jadi tidak saya ulangi lagi. Mungkin saya langsung ke halaman 20 terkait dengan dail saya yaitu Tangguh, saya ingin tahu perkembangan yang ada di sana dan kendala yang ada, mungkin izin interaktif Pimpinan, sebentar saja.

Terima kasih.

#### **KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**

Terima kasih, Pak Rico.

Untuk Tangguh Train 3 ini kapasitasnya adalah 3,8 juta ton LNG per tahun. Kalau di dalam apa namanya *progress project* tercatat 98% sudah, seperti kita ketahui bahwa *project* ini kan ditargetkan tadinya *on stream* di tahun 2021, tapi karena ada Covid pekerja di sana juga sempat apa namanya melonjak angkanya, kemudian di-*stop* untuk dibersihkan lapangannya dan biaya-biaya juga untuk karantina, baik di Sorong maupun di Makassar dan di Jakarta-nya disiapkan rencana agak banyak yang kerja.

Sehingga tergeser, tadinya kita berharap tergeser di Desember 2022 atau akhir tahun lah 2022 ini, tetapi ternyata pada saat melakukan pengecekan saat ini dalam tahapan *commissioning*, Pak. Jadi tes, tes masing-masing peralatan dites, kemudian oke maju lagi, maju lagi dan dalam *commissioning* inilah yang kemudian apa kadang waktunya yang menurut kebiasaan di Petro



Chemical ini memang agak sangat susah untuk diprediksi dengan tajam, kalau sudah konstruksi ya sudah, ini sekarang ini selesai, besok selesai, *progress*-nya bisa cepat sampai 98% ini, yang 2% masuk di *commissioning*, ini yang apa namanya *little bit unpredictable gitu* kira-kira. Tetapi EPC kontraktor sudah menjanjikan bahwa dia akan menyelesaikan di paling lambat akhir di Maret 2023.

Jadi setelah itu tentu *commissioning* dan nanti apa lalu *onstream*, jadi kalau sekarang ini *commissioning*, tes individual peralatan, pipa dibersihkan dan itu kadang-kadang ada yang tersumbat ada yang ini sehingga apa namanya sehingga bertahap-bertahap begitu karena pipanya cukup banyak dan kita harapkan seperti progres-nya, Pak.

Kalau secara angka 98% tapi yang 2% ini apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang sangat halus, *Inshaallah* kita berharap Maret 2023 ini juga tidak begitu *onstream* karena kita semua, kami juga yang di **...(suara tidak jelas 1.21.48)** maupun juga di *government* ini terikat dengan kontrak dengan pembelinya, Pak.

Jadi kalau kontrak ini *nggak* bisa disuplai itu namanya kita kena *soft fall*, kena denda yaitu kita negosiasi. 2022 kami sudah negosiasi, sudah menyelamatkan cukup banyak juga untuk mereka bersedia digeser ke tahun-tahun yang akan datang.

Terima kasih Ketua.

**F-NASDEM (RICO SIA):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T/F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke, terima kasih sama-sama Pak Rico Sia.

Ini memang *project*, tadi memang saya lihat Pak, Blok Masela Abadi itu selalu di mana-mana kalau mau *project* itu yang paling utama pembebasan lahan itu sudah 94%. Makanya Bapak itu harus serius Pak Kepala SKK Migas, jangan sampai orang berpikir bahwa Blok Masela itu kemarin dipindahkan dari *offshore* ke *onshore* itu hanya untuk urusan mafia tanah itu saja biar dapat pembebasan lahan.

Fakta itu pembebasan lahan non hutan 94% Pak, jadi jangan sampai, sampai sekarang *project*-nya *nggak* jalan-jalan pembebasan lahannya udah 94%. Jangan sampai dulu ini ada yang berpikir Pak, jadi salah satu masuk juga ke telinga saya itu, Pak. Dulu itu rencana mungkin salah satu diduga dipindahkannya apa *project* Masela dari *offshore* ke *onshore* itu hanya untuk menguntungkan mafia tanah di situ aja, itu harganya jadi naik.

Ya selanjutnya Pak Nasril, itu tadi hanya sentilan aja Pak, oh iya nanti habis Pak Nasril lanjut ke, saya tadi buat aturannya silakan lah dari siapa aja yang mau ngomong, *nggak* usah kita urut per partai *gitu*. Jadi *monggo* aja karena nanti kalau di urut partai nanti kan macam-macam, jadi yang tunjuk tangan duluan aja lah kita persilakan.

Silakan dulu Pak Nasril, habis Pak Nasril baru Pak Menteri ini.

**F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):**

Pimpinan yang kami hormati,  
Teman-teman Anggota Komisi VII yang kami banggakan,  
Pak Kepala SKK Migas dan segenap jajaran yang kami hormati.

Pak Dwi ya yang menarik adalah gagalnya kami melihat untuk pencapaian *lifting* 1 juta barel per *day*, ini sebuah isu yang beberapa tahun yang lalu diangkat. *Nah* Kepala SKK Migas dan segenap jajaran dalam tanda kutip SKK Migasnya, inikan seakan-akan menjadi tersangka Pak, tersangka kegagalan untuk pencapaian 1 juta per *day*. *Nah* ini yang kami tidak habis pikir, tidak ada erobosan baru dari SKK Migas-nya, kan ini isu yang menarik Pak, seiring juga penyelesaian RUU Migas.

Tanggapan-tanggapan teman-teman terdahulu terhadap SKK Migas ini, apakah dengan Perpres Nomor 9 Tahun 2013 ini ya, yang kami lihat fungsi daripada SKK Migas tidak full. Kalau dikatakan *independent*, kita ingin bertanya apakah yang dimaksud dengan *independent*.

Kalau toh juga meminta pertimbangan kepada Menteri ESDM itu kan tidak *independent*, artinya apa? Tidak ada kemerdekaan di SKK Migas saya melihat. Memang berujung kepada pertanggungjawaban kepada Presiden, *nah* ini yang kami melihat ini isu yang menarik ya seiring dengan, sejalan dengan akan diselesaikannya Undang-Undang Migas.

Dari paparan Pak Dwi tadi ya ada persoalan di dalam mencari investor baru yaitu terkendalanya terhadap perizinan yang sangat mendesak. Kami melihat di sini ada kelemahan koordinasi *interdept*, koordinasi *interdept* ini kan banyak Pak, dari kelembagaan, kementerian dan sebagainya.

Jadi pertanyaannya, apakah Bapak ini sejajar dengan menteri-menteri yang lain? Saya berikan contoh seperti dulu ada Kepala Badan Koordinasi Investasi BKPM, karena tidak mampunya badan ini maka diangkat dia menjadi menteri. Artinya apa? Disinilah kemampuannya koordinasi *interdept* tadi.

*Nah* ada pertanyaan terdahulu oleh teman-teman, apakah masih diperlukan SKK Migas ini karena ada kendala yang dihadapi. *Nah* kendala-kendala ini yang sesungguhnya menjadi kelumpuhan SKK Migas di dalam pencapaian-pencapaian target yang diberikan.

Kami tidak melihat itu Pak terhadap *gregetnya*, artinya otoritas yang diberikan terhadap SK Nomor 9 tadi. *Nah* ini yang sesungguhnya perlu dikaji

dan dipertimbangkan ya, apakah ini kan begini Pak ya, seperti penandatanganan tender toh juga dia masuk di situ adalah Dirjen Migas-nya.

Beda bagi Bapak ketika sebagai dirut ini dulu, apakah Dirut Pertamina, apakah dirut di semen, Bapak punya otoritas semua di situ. *Nah* hari ini Bapak tersangka pencapaian 1 juta barel per *day*, *nah* ini yang sesungguhnya kami melihat terhadap itu.

Yang kedua, saya mau bertanya apakah dengan sistem *gross split* ini ya, ini kan buah tangan Jonan dengan Menteri Keuangan. *Nah* dalam Bapak dalam melaksanakan, pelaksanaan dengan model *gross split* ini, inikan kami melihat dari peserta *bidding* dengan yang ini yang ikut tender-nya kan hanya maksimal 20-26%, 30% *lah taruh*. Artinya apa? Tidak menarik *gross split* ini bagi kontraktor, tidak menarik bagi kontraktor.

*Nah* siapa sesungguhnya yang ikut di *gross split* ini, apakah Pertamina? Karena Pertamina hari ini kan menguasai 70% produksi, kalau memang 30% ini hanya peningkatan investasi Pertamina, ya sudah di bawah Pertamina saja kalau *begitu*, yang dikoordinasikan dengan Menteri ESDM.

*Nah*, ini sesungguhnya perlu perdebatan-perdebatan kita menjelang RUU Migas, Pak. Bapak katakan tadi ada 5% investasi, *nah* ini yang mana kenaikan 5%, siapa itu kontraktornya? Kasihan SKK Migas ya posisi tersangka, itu saja judulnya, Pak.

Kalau memang ini apakah nanti membantu koordinasi *interdept* ya saya pikir menteri Pak, saya berpengalaman di BKPM, di Komisi VI kemarin, nggak mampu Kepala BKPM itu melakukan koordinasi *interdept* untuk mencari investor Pak, tak mampu sama sekali. Makanya di Presiden Jokowi kemarin ya Kepala PKBM ya diangkat sekaligus menjadi Menteri Investasi, artinya apa? Hari ini dia mampu untuk melakukan koordinasi *interdept*-nya. *Nah* ini *reasoning* yang perlu kita pertimbangkan menuju RUU Migas ini, itu satu hal, dua hal yang perlu kita pertanyakan.

*Nah* yang ketiga Pak, terhadap sistem *gross split* ini adakah yang Bapak berikan *reward* terhadap pencapaian target itu, Pak. Ini kan begini ditargetkan sekian, kita bayar *cost recovery* di depan. *Nah* bagaimana pencapaian target selama kalau *gross split* ini di 2018, 2017 sampai 2022 ya siapa yang mencapai target yang dalam model *gross split* ini. Kalau tidak mencapai target berarti *gross split* ini pertama gagal, yang kedua ya tentunya ada sanksi karena *cost recovery* bayar di depan.

*Nah* ini yang perlu, tiga hal yang perlu kami pertanyakan kepada Pak Kepala SKK Migas, sehingga kami tidak mau mitra kami menjadi tersangka. Tersangka artinya ketidakmampuan pencapaian 1 juta per *day* karena ketidakmampuan melakukan koordinasi tadi.

Itu saja pemikiran, terima kasih Pimpinan.



**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T/F-P.GOLKAR/WAKIL  
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terima kasih Bang Nasril dengan R bukan Nasir.

Selanjutnya Pak Menteri, silakan Pak Menteri.

**F-PKB (H. MARWAN JA'FAR):**

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pimpinan dan para Anggota Komisi VII yang saya hormati,  
Pak Kepala Migas dan seluruh jajaran yang kami muliakan.

Pertama-tama, saya memang masih harus butuh membaca lagi ini dalam konteks SKK Migas dan baru kali ini saya ikut rapat karena mungkin perwakilan dari temen-temen yang lain tidak datang ya terpaksa saya harus bicara.

Yang pertama adalah bahwa tentu Bapak meningkatkan berbagai macam produk yang mengandung TKDN, lalu bagaimana dengan *anger change* yang Bapak gunakan itu, apakah memang harus memenuhi TKDN secara persen atau memang tidak Pak? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua adalah mengenai *drilling*, ini alat kita sudah banyak yang reot *gitu* Pak. Oleh karena itu, saya kira peremajaan teknologi ini menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar, apalagi dalam konteks secara umum tidak hanya di-*drilling*, faktor alih teknologi dan teknologi baru sampai persoalan digitalisasi dan seterusnya, ini menjadi faktor yang tidak bisa diremehkan.

Oleh karena itu, misalnya munculnya *artificial* intelijen dan seterusnya itu adalah bagian dari upaya kita untuk melakukan digitalisasi dari segala aspek, meskipun dalam konteks *drilling* ini ya tidak ada relevansinya, mungkin tidak relevansinya tetapi ini akan sangat baik kalau ada semacam peremajaan dan teknologi yang baru.

Kemudian Pak yang kedua adalah bahwa kita selalu terkendala dengan data, nanti Pertamina beda, Kementerian ESDM, SKK Migas beda dan seterusnya. Data ini memang harus terus-menerus disesuaikan Pak sehingga sama soal bagaimana kita melakukan eksplorasi di Hulu.

*Nah* dalam konteks ini data menunjukkan bahwa *currenct account* defisit produksi migas kita itu baru mencapai 31 miliar US dolar atau sekitar dengan 439 triliun. Ini kan jauh dari harapan yang teman-teman katakan, sering katakan tentang *lifting* turun dan seterusnya, ini untuk produksi di sektor migas di hulu migas saya kira ini menjadi faktor yang sangat penting untuk kita tingkatkan disamping soal pendataan data tadi.



Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa kita perlu melakukan eksplorasi di kawasan sumur-sumur tua, yang memang masih dikatakan produktif dan sumur-sumur laut dalam, frontier laut dalam yang belum optimal kita lakukan.

Oleh karena itu, di laut dalam ini tentu membutuhkan semacam *effort* yang luar biasa. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan perimbangan atau ...(suara tidak jelas 1.37.34) eksplorasi di *onshore* dan sumur-sumur tua dan itu menjadi sebuah investasi yang sangat berat untuk kita lakukan, bukan mudah ini tentu.

Lalu pertanyaannya bagaimana SKK Migas bisa melakukan ini semua terhadap apa yang saya sampaikan tadi, sumur tua, lalu *onshore* di satu sisi ada di laut-laut terdalam. Ini yang tentu membutuhkan lagi-lagi *effort* yang luar biasa.

Kemudian yang ketiga adalah jika kita mempertimbangkan investasi di sektor hulu migas, tentu ini adalah bagian dari upaya kita untuk menarik investasi sebesar kurang lebih 21 *billion* US dolar dan ini ada di 29 sumur eksplorasi yang mayoritas masih kering. Bagaimana upaya ini Pak, untuk dilakukan supaya lebih konkret dan menghasilkan sebuah cita-cita kita yang lebih optimal.

Kemudian yang selanjutnya lagi adalah bahwa bagaimana upaya kita dalam menangani soliditas dan sekaligus evaluasi dan integrasi di sektor hulu migas agar menarik para investor migas untuk datang ke Indonesia untuk berinvestasi. Kayaknya ini kampanyenya kurang Pak, jadi oleh karena itu lagi-lagi ini butuh *share* informasi yang lebih luas, tidak hanya investor dalam negeri tentu juga investor luar negeri.

Kemudian yang selanjutnya Pak, lalu bagaimana performa dan komitmen yang sudah terealisasi para investor di hulu migas Pak, kemana saja mereka ini lokasinya, di mana saja lokasinya dan tentu investor mana saja yang sudah menaikkan kontrak di sektor ini. Mungkin kami butuh penjelasan dan butuh eksplorasi pendalaman yang lebih jauh.

Kemudian yang terakhir Pak Ketua, bagi perusahaan-perusahaan yang mendapatkan *cost recovery* itu kemana aja CSR-nya itu Pak, kan kita butuh juga itu Pak Pimpinan, untuk ya sama-sama perbaiki lah karena ini duit gede, tentu CSR ini harus menjadi bagian dari kita semua.

Saya kira itu, terima kasih.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T/F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terima kasih Pak, oke-oke nanti Pak Mul ya ronde selanjutnya ya sebentar ya.



Terima kasih banyak Pak Menteri atas masukannya dari beberapa pertanyaan, ada 5 tadi itu ya, 6, 7 dan itu bisa menjadi catatan nanti yang poin-poin yang penting dan strategis Pak direspon nanti tambahannya nanti bisa tertulis, tapi saya minta 7 poin *concern* itu bisa direspon.

Selanjutnya habis Pak Nasir baru Bro Lamhot *the dragon*.

Silakan Pak Nasir.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Baik, terima kasih.

Pak Pimpinan Komisi VII,  
Teman-teman Komisi VII,  
Saudara Ketua Kepala SKK Migas dan seluruh jajarannya.

Mungkin hampir sama sih yang disampaikan teman-teman yang disampaikan sebelumnya, kami *nggak* melihat bagaimana sih *road map* yang dibuat oleh SKK ini untuk menarik investor, karena saya lihat tidak ada yang mempresentasikan kekuatan minyak kita yang ada di Indonesia dan besarnya hasil minyak yang ada di Indonesia ini.

Saya tidak pernah mendengar presentasi itu, *cuman* grafik saja yang dijelaskan. Grafik ini anak kuliah bisa buat *gitu*, tapi *nggak* jelas Pak arahnya kemana *gitu*.

Mohon maaf izin Pimpinan, interaktif. Ini perencanaannya SKK ini bekas dari mana, izin Pak interaktif.

**KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**

Izin menjawab Pak, saya dulu di kontraktor kerja sama Pak, di Maksus dulu masih sebelum Sinok, sebelum PHE, kemudian di Inokal juga Pak yang kemudian jadi Chevron dan sekarang jadi Pertamina Hulu Kalimantan Timur.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Bapak di situ sebagai apa?

**KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**

Sebagai petroleum *engineer*.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Pernah melakukan pengeboran?

**KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**

Pernah Pak.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Terus bisa Bapak menciptakan satu kawasan itu bagaimana kandungan minyaknya.

**KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**

Bisa Pak, saya bersama tim Pak, nanti kan tim dari geologi, dengan tim-tim yang lain. Saya dari petroleum *engineer*-nya juga berkontribusi di sana Pak.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Sudah berapa lama Bapak di SKK?

**KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**

Saya di SKK dari tahun 2013 Pak, sebelumnya 2021 saya di BP Migas Pak, kemudian saya *assignment* di OPEC Pak di Austria Pak, selama 7 tahun balik lagi tahun 2013 sampai.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Waktu di OPEC Austria itu Bapak kerja di perusahaan minyak?

**KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**

Saya di sekretariat OPEC Pak.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Oh bukan bekerja sebagai di perusahaan minyak?

**KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**

Bukan.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Jadi bukan sebagai pelaku yang mengerjakan pengeboran *gitu*.

**KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**

Waktu di OPEC bukan.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**



Atas sebagai peneliti bagaimana mendapatkan minyak yang besar.

**KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**

Saya sebagai peneliti Petroleum Industri di sana Pak.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Saya sedikit mau tanya, berapa sih kandungan minyak yang di salah satu K3S kita ini yang paling besar, yang mana yang paling besar.

**KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**

Yang kalau kita bicara potensi, Rokan besar Pak, potensi ke depan.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

*Nggak* saya tanya aja Pak, saya tanya tadi mana yang Bapak tahu dari K3S kita yang memiliki kandungan *crude* yang paling besar Rokan *lifting*-nya.

**KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**

Rokan Pak, di wilayah kerja Rokan Pak.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Rokan dulu itu Pak waktu tahun '90-an itu masih tinggi *gitu*, sekarang minyaknya kemana *kok* bisa *cuman* tinggal 100 sekian.

**KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**

Iya itu ada *decline* memang Pak, dalam perjalanannya kan ada *decline* dari, memang paling besar dulu memang Chevron Pak, yang Rokan kemudian *decline* ...(suara tidak jelas 1.44.39)

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Sekarang Pak.

**KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**

Sekarang turun jauh Pak memang dari dulu Pak.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**



*Nggak*, sekarang Bapak bisa naikkan drastis dari kajian yang Bapak milikin, berapa sih yang bisa dikeluarkan ini targetnya kan 1 juta ya, bagaimana mencapai 1 juta itu.

**KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**

Iya memang kalau dari Rokan nanti kan kita harapkan ada EOR ini ya Pak dan ada beberapa sumur-sumur lapangan-lapangan tambahan nanti akan.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Bapak udah cek *cost recovery* belum waktu dikerjakan Chevron ya, berapa jumlah EOR yang dibiayai oleh Chevron, terus jadi proyek gagal, berapa nilainya, itu Pak Fatah tahu. Itu gagal Pak EOR-nya, Bapak mau pakai yang mana lagi. Kalau pakai EOR itu Chevron sampai hari ini belum ada hasilnya.

**KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**

Yang *chemical* Pak, iya betul Pak.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Iya, kita berapa kali sama Pak Fatah itu ke Minas ngecek lokasi EOR-nya sampai hari ini gagal itu proyeknya, mau pakai EOR yang seperti apa. Dulu ada ini Pak Sekretaris waktu dia sebagai pengawas di SKK, dia bilang "*cost recovery*-nya hancur-hancuran Bang, kita mau periksa aja udah ada yang nelpon suruh bayar", *nah* sekarang karena beliau sudah sekretaris, beliau diam-diam aja. Itu betul, ini saya ngomong di sini memang itu yang diomongkan sekretaris ini sama saya. Sekarang yang ngawasin duduk diem aja, gimana coba, kan kacau kalau begini.

Saya maunya ini, kita Komisi VII maunya ini yang duduk di sini itu ahli minyak semua, baru bisa menciptakan bagaimana regulasi *lifting* kita ke depan, per tahun, tiap tahun, ini enggak ada yang bisa nyiptakan ini, ini cuma titipan doang di sini semua.

*Nah* kita usulkan Pimpinan Komisi VII, ini kita bubarkan saja ini SKK. Kita minta pada pemerintah di-*sharing*, dicari anak bangsa yang sudah punya pengalaman, kalau nggak, *nggak* ada artinya *gitu* loh. Orang *cost recovery*, bayar, *ting tong-ting tongan* di situ. Saya dengar sendiri, saya mau buka Bang, udah ditelepon gimana, tutup lagi itu, jangan diperiksa, bayar nanti kontraktornya bikin kewalahan keuangannya.

Kita Pak, kalau berdagang *cuman* seri saja percuma, kalau kita *nggak* ada untungnya 2 kali sampai 3 kali lipat, ngapain *gitu*. Ini kan K3S ini kan dagang sama kita semua, kalau *nggak* ada manfaat yang besar kita miliki,



mereka bermain lagi di *cost recovery* untuk mengambil uangnya lagi kan percuma.

Yang saya tanyakan sekarang, apa sih kualitasnya K3S ini, apa SKK ini, kualitasnya yang kita minta. Kualitasnya apa, apa sih target macam Bapak bidang operasi, apa yang akan Bapak lakukan tahun depan, *cuman* datang kunjungan diladeni makan siang, pulang udah selesai. Apa Pak, Bapak jelaskan di sini, negara bayar Bapak mahal loh, besar gajinya, apa yang dilakukan, apa bukti jasa kita sama negara. Kalau *nggak* ada Bapak pun udah jalan K3S ini, orang memang jalan mereka, tapi apa gebrakannya, apa hasil temuan SKK ini yang akan menarik investor tertarik tentang regulasi perencanaan yang kita buat, yang kita jual, contohnya satu tambang batubara itu.

Setelah dilakukan konsultan, setelah dia dapat kajian kandungan, setelah dia dapat jumlah kandungannya berapa, layak dijual harganya mahal. *Nah* Bapak, sekarang apa yang Bapak mau jual, kalau toh tetap investornya juga yang mau ngebor, yang mau nyari, yang Bapak suruh, Bapak *cuman* geologi. Wong geologi aja kita kasih dana dari sini *nggak* ada yang hasil jelas kok, yang mana yang Bapak pakai.

Bapak harusnya meng-*hired* tenaga-tenaga asing dibawah konsultan, dibawah perencanaan ini, cari tenaga dari luar sana seperti yang dilakukan negara-negara lain, kita baru mempunyai kandungan yang jelas, artinya yang jelas, bisa dijual, kalau gini Pak, Bapak aja *nggak* pernah tahu, *nggak* pernah melaksanakan regulasi ini, gimana coba. Bapak bilang di Rokan itu tanahnya aja ada minyak, *lah iya lah* dari tanah terus keluar minyak tapi kan tidak tahu Bapak saya tanya berapa sih kandungan *crude* yang ada di dalam itu, harusnya kan tahu Pak, cari dong orang yang bisa ngitung itu. Bagaimana kita menjual hasil perencanaan kita ini kepada negara-negara yang akan menginvestasikan uangnya di Indonesia.

Kalau yang cuma jelaskan Kepala SKK tadi, *nggak* ada yang menarik Pak, *nggak* ada yang jelas, *nggak* ada yang *landing* angkanya. Ini hasil perencanaan kami, nah baru. Semua batubara itu Pak, konsultannya orang Australia, mana konsultan Bapak yang mengkaji minyak ini, dari mana Bapak cari, *nggak* ada kan. Bapak cuma terima laporan dari K3S, kami prediksi ke sana Pak minyaknya, kami prediksi minyak di sini, mana yang dilakukan, berapa besar negara ngabiskan uang tiap tahun untuk SKK ini tapi *nggak* ada hasilnya, *cuman soft copy* saja.

Kami minta Pak Ketua, kita buat panja saja apa sih hasil regulasi SKK ini. Kalau *nggak* ada, kita buat surat ke presiden, kita minta dibubarkan atau dilengketkan saja ini ke Dirjen Migas *gitu*, dibentuk saja badan di sana, di bawah menteri langsung karena menteri kan yang jual, Menteri juga yang ngeluarkan kontrak, *nggak* ada gunanya *gitu* loh, *nggak* ada kajian yang pasti yang menimbulkan keuntungan buat negara, hanya regulasi yang sudah dijalankan kontrak yang ada sekarang.



Saya minta itu Pak Maman, jadi pertanyaan saya bagaimana SKK menghitung berapa jumlah *crude* kita yang ada di perut bumi ini, *lifting*-nya berapa yang bisa kita targetkan dalam satu tahun, peningkatannya berapa, pakai teknologi apa, siapa perencanaannya.

Itu yang saya minta *gitu*, berapa sih, mana konsultan yang mengerjakan ini. Kalau perencanaannya cuma begini, Deputi Perencanaan siapa dibelakangnya, Bapak harus *hire* dari negara-negara yang maju sana, baru kita bisa tahu ini Rokan itu segini, oh di blok yang ini, ini, ini segini *gitu*, baru dijual. Begitu dijual investornya datang semua, tertarik dia, ini Bapak suruh investor investasi kalau gagal duitnya hilang, mana ada yang mau.

Mungkin itu Pimpinan, mungkin saya minta dibentuk panja saja. Kita minta pertanggungjawaban dari SKK ini, kalau *nggak* ada bentuk pertanggungjawabannya, kita minta bubarkan saja nih *nggak* ada gunanya, percuma.

Mungkin itu, terima kasih Pimpinan.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T/F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih banyak Pak Nasir, tapi saya agak senang Pak Nasir tadi masih ada senyumnya, biasanya gayanya *nggak* ada senyumnya, jadi masih bersyukur Pak, yang penting masih ada senyumnya, *oh* karena ada Pak Sartono.

Oke, selanjutnya habis Pak Gunhar nanti, Pak Gunhar dulu nanti baru Pak Lamhot *of the dragon* baru nanti.

Silakan Pak Gunhar, tanggung bersebelahan, kayanya udah saling colek-colekan kali.

**F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang kami hormati Pimpinan dan rekan-rekan Anggota dan juga Pak Kepala SKK Migas beserta jajaran.

Jadi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh rekan-rekan terkait dengan RUU Migas. Saya coba untuk *me-review* kembali kenapa bisa terjadi terbentuknya SKK Migas. Jadi sebelum SKK Migas ini dibentuk ini ada



kebijakan negara yang sistem 3 kaki istilahnya itu Pimpinan, ada Pertamina, ada BPH, ada BP Migas.

Jadi BPH Migas ini mengatur sektor hilir, itu berkaitan dengan penyaluran, distribusi dan lain-lain. Kalau BPH Migas ini mengatur sektor hulu, berkaitan dengan proses lelang, produksi iya kan, terus penyaluran untuk kepada perusahaan-perusahaan yang melaksanakan eksploitasi itu. BPH Migas, BP Migas ini dasarnya 3, setelah BPH Migas ini berubah menjadi SKK Migas ini ada yang luput, ada yang luput dari pantauan kita. Kenapa saya bilang ada yang luput? Berarti dari BPH Migas ini berubah ke SKK Migas.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Mungkin BP Migas ?

**F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):**

Iya dari BP Migas ini berubah ke SKK Migas ini ada perubahan status. Perubahan status ini waktu dia di BP Migas dan BPH Migas ini prosesnya ini punya sistem penggajian sendiri, gajinya ada sendiri betul Pak ya, tapi ketika dia berubah menjadi SKK Migas, ini dikoordinasikan Kementerian ESDM, eselonnya pun mengikuti eselon berdasarkan Kementerian ESDM, BAKN itu, iya kan eselonnya diatur.

Sekarang pertanyaan kita ini, ini kalau dia prosesnya mengikuti eselon dari BAKN, gajinya seperti apa, gajinya tadi. Yang tadi dia di BPH punya sistem sendiri penggajian, begitu dia masuk ke SKK Migas mengikuti struktur BAKN eselonnya itu dia harus tunduk dan patuh kepada Undang-Undang BAKN. Jadi kalau gajinya dengan payung hukum Perpres *nggak* cocok, dari mana rumusnya, teorinya. SKK Migas ini statusnya ini *nggak* jelas, banci, ini soal gaji.

Kalau mau bubarin SKK Migas ini salah satu bentuk dari analisis hukumnya, ini kalau kita mau bubarin SKK Migas ini karena dari situ pun sudah salah. Statusnya itu PNS mengikuti eselon dari kementerian, tunduk dan patuh pada aturan **BKN**, penggajiannya pun itu berdasarkan Perpres, *nggak* ada teorinya itu, *nggak* ada. Apalagi SKK Migas ini dibentuk berdasarkan Perpres, jadi pintu masuk kita kalau mau bubarin SKK Migas ini dasarnya hukumnya, kalau mau bubarin ini udah masuk barang ini dan kalau tidak ini akan saya sundul ini ya, semua yang terkait SKK Migas ini masukin penjara semua, kenapa? Karena merugikan negara.

Kalau bicara SKK Migas ini harusnya bicara *lifting*, peningkatan produksi, eksplorasi, ditemukan lahan baru, ini 3 tahun terakhir *nggak* ada kita lihat, *nggak* ada sama sekali *gitu* loh kawan-kawan. Kalau kita mau bubarin itu sangat ya ada opsi lah, paling tidak RUU Migas itu bisa menjadi solusi sesegera mungkin begitu Pak Kepala, kalau *nggak* ini saya yang akan lakukan gugatan, saya masukin semua penjara, kenapa? Korupsi.

Dia menerima gaji sebagai PNS tetapi besarnya sebagai BUMN, *nggak* tepat. Payung hukumnya itu pakai Perpres, *nggak* tepat. BUMN punya undang-undang sendiri tentang BUMN, itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, ASN punya Undang-undang sendiri Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, besaran tunjangan dari ASN dengan BUMN berbeda. Ini dasar hukumnya undang-undang, *lah* berdirinya SKK Migas ini Perpres, eselonnya ngikutin BAKN, penggajiannya ngikutin BUMN, *enggak* cocok ini itu dari kajian hukumnya, Pak.

Jadi kalau mau bubarin lagi ini barang Ketua, kata bos kita itu, belum kita bicara peningkatan produksi, 3 tahun terakhir turun. Jadi keberadaan SKK Migas tadi apa yang disampaikan Pak Nasir, betul, *nggak* usah perlu ada ahli-ahli *kayak gini* Bapak-bapak yang punya pengalaman kerja begini, kalau produksinya *nggak* ningkat, udah lah itu ngomong aja itu.

Kita semangat mengambil alih blok Mahakam, blok apa Chevron, mana ada, bohong semua. Faktanya hari ini turun begitu, jadi kita **pailitkan** saja Ketua pada forum RDP kita hari ini bahwa RUU Migas itu sudah menjadi kewajiban kita, selesai harus rampung periode 2019-2024.

Revisi Undang-Undang Migas ini Ketua sejak saya tahun 2014 duduk di ruang Komisi VII ini selalu begini, mau didorong ditahan, mau didorong ditahan, ada apa ini? Iya kan. Sementara produksi tidak meningkat, *cost recovery* semakin besar, negara semakin tergerus keuangannya, jangan-jangan di bawah-bawahnya ini ada *cawe-cawe*-nya iya ada *cawe-cawe*-nya.

Di kasih PSC *nggak* mau, nunggunya *cost recovery*, ini *enggak* beres ini. Jadi kalau tidak segera kita tuntaskan RUU Migas ini, saya sendiri yang akan melaporkan bahwa seluruh terkait SKK Migas ini masuk penjara semua, iya betul korupsi, dasarnya jelas, dari mana dia digaji, apa dasar hukumnya, pakai Perpres *nggak* bisa, udah jelas kok 2 undang-undang mengatur tentang ASN, tentang BUMN. Bapak sekarang digaji pakai standar apa, Pak? Pak Kepala?

**KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**

Ada persetujuan dari Kementerian Keuangan.

**F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):**

*Nggak* saya tanya, itu pakai Undang-undang ASN mengikuti eselon yang ditentukan oleh Kementerian ESDM karena jabatannya setara dengan eselon atau pakai Undang-Undang BUMN sesuai dengan kesepakatan kerjasama.

**KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**

Keuangan yang dipakai untuk SKK Migas itu adalah APBN, Pak.

**F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):**



Iya semua pakai APBN Pak, paham saya, *nggak* mungkin pakai uang Pak Maman, uang Pak Nasir. Maksud saya payung hukumnya Pak, iya kan, kalau Bapak jabatannya setara eselon 1 berarti ngikut kepada Kementerian ESDM, Undang-Undangnya Nomor 5 Tahun 2014, diatur tentang tunjangan, hak-hak Bapak semua jelas.

Tetapi kalau kita pakai BUMN Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 87 ayat (1), ayat (2), kesepakatan, punya ketentuan tersendiri. Ini 2 hal yang berbeda tapi kalau Bapak menerima gaji BUMN dan statusnya disetarakan dengan ASN, berpayung hukumkan Perpres, saya pastikan Pak. Saya pastikan semua penerimaan itu tidak tepat terkait dengan seluruh SKK Migas kita penjarakan, kita tuntutan hak publik, bener saya bilang ini. Kalau tidak segera mungkin berubah, Undang-Undang Migas itu harus lahir dari Komisi VII DPR.

Saya bingung Pak, 2014 saya sudah ketemu sama Pak Dwi ini, bikin Panja RUU Migas, rapat, rapat, rapat *nggak* selesai-selesai sampai akhir jabatan ganti 2019 lagi-lagi RUU Migas, ketemu lagi di ujung-ujung akhir jabatan 2022 ini setengah-setengah lagi dorongnya.

Kita ini pelajarin DIM-nya itu Pak dari 2014, kita paham seluruh persoalan itu, dari lahirnya SKK Migas, persoalan BPH Migas semua kita tahu tapi kenapa *nggak* ada *spirit* dorongan kita itu ayo kita perbaiki, ayo kita atur, mana yang kurang kita benahi. Ini sengaja saya pendam saja Pak, saya tanya kepada Ketua Panja RUU Migas, gimana ini? Belum ada, belum ada, gimana, ya Pimpinan.

Saya ini mungkin kurang berkenan Pak cara menyampaikannya ya tapi sekali lagi saya pastikan, kalau RUU Migas itu tidak segera kita bahas, saya pastikan saya yang akan melakukan gugatan itu dan saya pastikan juga Bapak-bapak yang terkait SKK Migas itu penjara, merugikan keuangan negara. Tidak ada teorinya payung hukum pakai Perpres itu orang bisa dibayar dengan 2 undang-undang yang ditabrak, status Bapak sebagai ASN disetarakan tapi menerima gaji berdasarkan gaji BUMN.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terima kasih.

Tadi udah, saya jadi agak langsung agak bengong tadi saya melihat Pak Gunhar ini.

**F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):**

Inikan bagian dari ekspresi.



**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ini karena memang sudah proses yang sangat Panjang ini, memang yang namanya migas ini sesuatu yang sangat seksi. Jadi ibarat kalau cewek cantik itu Pak, seksi *gitu* lah itu memang *attractive* Pak, jadi membuat orang tertarik untuk ikut terlibat mengurus semua urusan migas ini.

**F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):**

Ketua, itu tadi saya baru bicara aspek hukumnya, belum saya bicara aspek teknis, produksi, bisa saya kulitin dia Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya *oke*, cukup, cukup Pak.

Saya pikir itu udah cukup lah itu apa pesan-pesannya dari Pak Ganhar, ini namanya sekarang saya ganti, sudah bukan lagi Gunhar Pak, tapi Ganhar. Saya *nggak* mau tambahin d Pak, tambahin d makin keras nanti.

Iya terima kasih Pak Gunhar tapi saya meyakini bahwa memang *gini* kalau kita mau bicara, saya dalam konteks kepastian hukum di migas ini saya sama dengan Pak Gunhar, walaupun *angel* tadi *debatable* lah ya, bagi saya begini, suka ataupun tidak suka investasi itu akan melihat dalam konteks kepastian hukum, pasti itu.

Yang namanya saya mau *spending* uang dalam jumlah yang besar di tengah kondisi, situasi, transisi energi dari fosil *fuel* menuju ke non-fosil *fuel* itu, orang pasti akan sangat berhitung untuk *spending* uang.

*Nah* pertanyaannya apakah saya sebagai investor mau *spending* uang di Indonesia dalam konteks investasi di sektor migas? Pasti akan mempertimbangkan dua hal, transisi energi dari fosil *fuel* menuju non-fosil *fuel*, lalu yang kedua bicara masalah kepastian hukum. Itu yang memang akhirnya membuat, kebetulan saya juga, ini saya tambahkan tapi kalau dalam konteks konsekuensi hukum payung Perpres itu mungkin agak berbeda dengan Pak Gunhar, tapi karena Beliau mungkin dari sisi hukum lebih kuat jadi saya *nggak* tahu ininya.

Tapi kalau 2 bulan yang lalu saya di forum IPA, memang hampir semuanya aspirasinya ingin mempertanyakan terkait RUU Migas ini. Jadi memang menjadi sebuah kebutuhan kalau saya melihatnya bukan lagi sebuah kewajiban, bukan lagi sebuah keharusan, tapi memang menjadi sebuah keputusan dalam rangka untuk mendorong percepatan optimalisasi pemanfaatan minyak dan gas kita di negara kita.

Saya pikir itu tambahan dari saya, *nggak* usah lagi di argumentasi, dibantah lagi Pak Gunhar. Itu tadi saya memoderasi soalnya di sebelahnya ada



Pak Nasir, soalnya paling sering ini kalau Pak Nasir ini berhadap-hadapan, jangan ditambah lagi dengan Pak Gunhar pusing nanti kepala saya.

Selanjutnya silakan dari Pak Lamhot *the dragon*.

**F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):**

Izin sebentar, maaf Pak Lamhot.

Saya mohon izin saja Pak Pimpinan, saya ada tamu mau pamit. Jadi tadi apa yang saya sampaikan nanti saya ikuti lewat *virtual* selanjutnya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terima kasih Bu Diah.

Kami ini berterima kasih dengan Bu Diah karena Bu Diah satu-satunya wanita dengan rasa apel segar yang masih mau bertahan di ruangan ini.

**F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):**

Hati-hati Bu Diah. Bisa saya mulai?

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Silakan Pak Lamhot Sinaga, panggilannya Lamhot *the dragon*.

**F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):**

Terima kasih, Pimpinan.

Kalau bicara setelah Vladimir Gunhar agak repot kita karena semua sudah diborong.

Baik,

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pimpinan Komisi VII dan teman-teman Anggota Komisi VII yang saya hormati, Pak Kepala SKK Migas dan seluruh jajaran.

Tadi saya pun jadi bingung apa yang mau saya sampaikan ya, Pak Nasir tadi sudah panjang lebar ditambah lagi dengan dosen Gunnar ini. Hari ini dia menunjukkan kualitas sebagai seorang dosen, bukan hanya sebagai seorang politisi tapi juga seorang dosen, mengerti semua *history* daripada SKK Migas itu sendiri. Tadi teman-teman sudah menyinggung soal, khususnya soal



minyak, saya sedikit aja di minyak. Saya bicara 2 hal, satu minyak, satu gas Pak Dwi.

*Decline*-nya terus *lifting* kita, kemarin waktu kita juga bicara dengan teman-teman dari Pertamina, baik PHE maupun PHL seharusnya yang perlu kita dorong untuk menaikkan *lifting* kita ini kan bahwa menurut mereka banyak lapangan sumur-sumur tua yang mungkin secara keekonomiannya katakanlah 10-20 barel yang mungkin tidak bisa mereka kelola.

Tapi kemudian kalau kita dorong ini di-KSO-kan katakanlah kepada perusahaan-perusahaan yang memungkinkan masih bisa mengelola sumur-sumur tua yang Pertamina *nggak* mungkin masuk ke situ ataupun K3S lainnya, karena secara keekonomian *nggak* bisa dikelola, di-KSO-kan aja Pak, didorong ya, ya kalau misalnya ada sekian puluh lapangan atau sekian ratus sumur misalnya dengan 20 barel, 30 barel kan nambah juga Pak *lifting* kita daripada dibiarin nganggur.

*Nah* modelnya skemanya seperti apa, saya kira SKK Migas juga harus *concern* mendorong itu dengan target supaya *lifting* kita bisa bertambah ya. Itu yang pertama saya katakan. Pertanyaan saya adalah apakah skema itu ada di SKK Migas, itu yang pertama.

Yang kedua soal gas Pak, Satgas ini kan kita surplus ya Pak tapi kalau kita lihat Pak ya terkait juga tadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman terhadap eksistensi daripada SKK Migas. Kita tidak melihat Pak, dengan gas ini sebenarnya harusnya kan kita tumbuh industri-industri pionir Pak.

*Nah* dari dulu Pak saya juga selalu mendorong industri yang menggunakan gas sebagai *raw material* dengan industri yang menggunakan gas sebagai bahan bakar itu harus betul-betul terpisah dan harus ada atensi khusus terhadap industri yang menggunakan gas sebagai *raw material*.

*Nah*, berikutnya lahirnya Perpres 121 terhadap *fix price* 6 dolar, ini juga pemberlakuannya masih belum berkeadilan Pak. Tidak semua industri yang ada di Perpres 121 itu mendapatkan fasilitas itu, dibuatnya Perpres 121 sebenarnya kan pertama tujuannya adalah supaya industri di Petrokimia kita bisa melahirkan industri-industri pionir dalam rangka mengurangi angka importasi kita dari waktu ke waktu yang kita semakin hari semakin naik importasi di bidang *petrochemical*.

Ini yang kita lihat, di satu sisi gas kita surplus tapi di sisi lain industri *petrochemical* kita ataupun tidak ada yang tumbuh Pak. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah tentang penetapan harga gas dan konsistensi terhadap penggunaan Perpres 121 yang *fixed price* 6 dolar itu, ini kan menjadi masalah.

Saya pernah menemukan satu *case* Pak ya, SKK Migas sudah menyatakan bahwa industri si A misalnya adalah industri yang mendapatkan fasilitas sesuai dengan Perpres 121 yaitu *fixed price* 6 dolar, tetapi keputusan SKK Migas ini tidak digubris oleh Kementerian ESDM. Ini tadi terkait juga soal kelembagaan yang dimaksud oleh Pak Nasir dan Pak Gunhar tadi itu ya.



SKK Migas sudah mengatakan bahwa industri ini adalah sektor industri yang masuk dalam Perpres 121 maka dia *fixed price* 6 dolar, tapi kemudian Kementerian ESDM bilang “*lah nggak* ini harus menggunakan sistem formula blablabla dan seterusnya”, sehingga dia yang harusnya industri ini bisa menjadi industri turunan terhadap produk-produk yang lain, dia tidak bisa tumbuh Pak. Bahkan industri *existing*-nya sendiri pun kemungkinan besar akan menjadi menghadapi suatu masalah, nah itu yang pertama.

Yang kedua, saya juga melihat Pak ini agak saya sedikit buka ya supaya nanti SKK Migas pasrah nanti, mudah-mudahan RUU Migas itu cepat didorong supaya ini juga masuk dalam muatannya. Ketika Perpres 121 ya yang *fixed price* 6 dolar belum dibuat ya, pupuk kita kapasitas produksinya adalah 15 juta ton tapi setelah Perpres 121 ternyata pupuk kita juga kapasitas produksinya sama.

Pertanyaan saya, kenapa *kok* industri pupuk kita yang naik adalah amoniaknya, ini aneh Pak. Makanya kami setiap turun ke dapil Pak, kami selalu diteriakin sama masyarakat pupuk langka, padahal kita sudah ada fasilitas Perpres 121. Tujuan kita memberikan itu kan supaya industri pupuk ini bisa meningkatkan produksinya, tapi yang naik justru bukan pupuknya tapi yang naik adalah amoniaknya karena dia harus ekspor, pendapatan dia dari situ. Artinya apa?

Ini ada sebuah deviasi Pak Dwi terhadap industri pupuk kita. Ini adalah sebuah deviasi kebijakan yang dilakukan oleh mereka. Pertanyaan saya kenapa SKK Migas membiarkan ini, kenapa SKK Migas membiarkan itu. Lalu kemudian kenapa SKK Migas sudah memberikan harga tertentu sesuai dengan Perpres 121, tapi bisa dianulir oleh Kementerian ESDM dan Kementerian ESDM menggunakan penetapan harga yang berbeda, tidak sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh SKK Migas.

Maka sangat relevan tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu, di mana seara kelembagaan SKK Migas ini dalam proses penetapan harga misalnya, toh tidak bisa, tidak *independent*. Yang terdampak apa? Yang terdampak adalah tidak ada tumbuhnya industri pionir di kita, tidak tumbuhnya industri pionir di kita maka angka importasi kita khususnya di sektor *petrochemical* itu selalu tinggi dan bahkan makin tinggi dari tahun ke tahun. Ini yang selalu diteriakin Bapak Presiden. Saya mau tanya Pak Dwi, ada nggak industri *petrochemical* kita setelah Perpres 121 yang 6 dolar, ada *nggak* yang tumbuh? *Nggak* ada Pak.

Nah ini mohon dijawab Pak Dwi ya untuk *case-case* tertentu ini saya udah lapor Pak Ketua, ini kita harus bawa ke Panja Migas karena saya lihat ini ada sebuah proses deviasi terhadap penggunaan Perpres 121, bukan pupuknya yang naik tapi malah baik produknya yang naik karena itu ekspor ya.

Nah ini penting menurut saya harus kita tuntaskan hal ini dan juga harus kita mendorong dengan adanya fasilitas Perpres 121, kita harus mendorong industri *petrochemical*. kita tumbuh untuk menjadi industri-industri turunan lain

yang pada saat ini kita angka importasinya tinggi di dalam industri *petrochemical* itu sendiri.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terima kasih, Pak Lamhot.

Ya, ini memang bagian dari, bagian dari poin-poin situasi ambiguitas Pak secara struktur hukum di SKK Migas apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gunhar. Bahkan ada lagi wacana yang beredar memang kalau tadi menyambungkan yang disampaikan oleh Pak Lamhot, ya sudah lah ditaruh aja SKK Migas di bawah ESDM. Artinya secara, ini wacana, institusionalnya dibongkar, dilebur, dimasukkan aja dibawah ESDM karena toh sekarang udah kayak *gitu*.

Namun memang kalau dilihat dari *cek and balance* dan dalam konteks membangun independensi konstitusional dalam rangka untuk mendorong optimalisasi itu juga masih belum bisa kita anggap tepat *gitu*. Makanya kajian-kajian ini terus menjadi bahan ini kita, kalau kita lihat dari aspek historis Pak, dulu pada saat SKK Migas *independent* Pak itu luar biasa *powerfull* secara institusional, produksi juga masih *oke* banget.

Namun kan sekarang ini kan saya pikir bisa menjadi bahan kajian, tapi ini nggak usah diperdebatkan dulu ya teman-teman ya. Jadi saya pikir ini bisa menjadi bahan diskusi kita, artinya saya pada konteks yang sama bahwa memang RUU Migas ini menjadi sebuah kebutuhan, bahwa nanti perdebatannya yang mau dimanakan, mau ditaruh dimana segala macam. Saya pikir semangatnya adalah gimana caranya produksi kita bisa naik, saya pikir itu dulu perdebatannya.

Saya pikir nanti terakhir dari Pak Sartono, begini ntar dulu, kita sepakati dulu ya jam, 30 menit, jadi sampai jam 1.30 kita *close* ya. Makanya kita tuntaskan 1.30 selesai karena begini nanti jam 2 itu ada agenda juga Rapat Panja Peningkatan Pendapatan Negara dengan 15 perusahaan batubara, itu pasti lama juga. Jadi maksud saya.

**ANGGOTA:**

Ketua, skors aja dulu, makan siang sebentar ini lagi program soalnya nanti gara-gara disinikan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terakhir Pak Sartono dulu ya, silakan Pak Sartono.



## F-DEMOKRAT (SARTONO HUTOMO):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan Komisi VII dan para sahabat Komisi VII yang kami hormati,  
Pak Kepala SKK Migas dengan seluruh jajarannya yang kami hormati.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Setelah menyimak dengan seksama apa yang di sampaikan masukan daripada teman semuanya, saya tidak mengambil kesimpulan tetapi juga mempunyai suatu pandangan bahwa harus ada kepastian, kepastian hukum, payung hukum apa untuk Undang-Undang Migas ini. Tadi ditempatkan dimana? Bapak menteri atau kalau bisa diperkuat betul, jadi mempunyai daya ungkit, daya dobrak begitu untuk meningkatkan apa *lifting* migas kita, ya dia diberikan suatu peran misalnya untuk *me-negotiate*. Jadi kalau hanya seperti ini ya untuk apa *begitu*. Jadi harus diberi peran betul dibawah presiden kalau bisa.

*Nah* ini bukan kesalahan, saya tidak membela SKK Migas, tidak ada kesalahan dari SKK Migas saja tapi bagaimana di atas-atasnya ini di dalam rencana kerja pemerintah menengah dan panjang gimana, dimasukkan *ndak* itu SKK Migas ini untuk bahwa *begitu* urgensinya *lifting* minyak kita semakin turun, dari pernah kita 1,7 juta per barel sekarang tinggal 600 ribu per barel.

Ini kan kritis ini, ini Pak Presiden mengetahui ini *enggak* ini harus kita tarik itu, tanggung jawab beliau juga ini, menteri-menteri terkait, Menteri ESDM, Menteri Investasi ya harus memahami betul, tidak bisa kita serahkan kepada SKK Migas ini kan SKK Migas kan apa istilahnya ya apa, tidak diberikan suatu wewenang *gitu*.

Jadi kalau *enggak* nanti 5 tahun lagi akan begini terus, jadi saya bersepakat untuk mendesak, mempercepat payung hukum Undang-Undang Migas ini yang mengatur dari segalanya, yang mengatur menempatkan daripada SKK Migas ini yang *Insyaaallah* mungkin punya sumber daya manusia yang baik mungkin, yang *qualified* misalnya, tetapi ini kan sudah proses panjang, latar belakang tadi sudah disampaikan oleh yang terhormat Pak Gunhar, bagaimana ini SKK Migas ini terjadi.

Ini kan memberikan harapan untuk sebagai peran, untuk memberikan satu negosiator di situ, tapi dia bukan operator kan begitu supaya tidak ada masalah hukum. Inikan harus kita runut kembali, kita kembalikan kepada roh atau esensi daripada SKK Migas ini dibentuk.

Jadi kita ini harus bagian daripada solusi Pimpinan, jadi bagaimana kita mempercepat, kita memperkuat dan disampaikan juga kepada para menteri-menteri ini yang terkait, serius *nggak* ini. *Nah*, ini apakah ada bayangan itu para petinggi ini *gitu* kan tentang SKK Migas, harus Bapak sampaikan juga Pak Dwi

harus ngotot-ngotot juga begitu untuk apa, bahwa ini Undang-Undang Migas ini bisa terlaksana begitu.

Dalam hal ini saya pikir kami bersepakat Komisi VII DPR RI akan memberikan juga *support*, dukungan begitu supaya ada kepastian. *Nah* kalau kita mau negosiasi tidak ada kepastian hukum, tidak ada payung hukum ya investor juga mikir-mikir juga *gitu*. Jadi ini badan ini kalau menurut saya harus diberikan amunisi, diberikan kekuatan *gitu*.

Kalau tidak nanti akan bentuk badan baru lagi begitu, tapi juga tidak ada payung yang kuat. *Nah*, ini saya pikir dalam forum yang ini, yang terhormat ini saya pikir harus ada percepatan *begitu* Pimpinan, diagendakan begitu agar Undang-undang Migas ini bisa dibahas dan juga akhirnya menjadi suatu hasil atau keputusan dari suatu undang-undang.

Demikian, terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terima kasih Pak Sartono.

Saya lihat kayaknya Demokrat ini kayaknya *full* tim hari ini kalau udah bicara RUU Migas, mungkin karena yang tanda tangan Perpres-nya Pak Susilo Bambang Yudhoyono dulu Pak.

Silakan Pak.

**F-DEMOKRAT (Drs. HENDRIK SITOMPUL, M.M.) :**

Terima kasih.

Selamat siang,  
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat dan kami banggakan Pimpinan dan Anggota Komisi VII serta Pak Dwi beserta jajarannya yang kami hormati.

Pertama Pak Dwi, saya dari data yang ada, *slide* yang ada tidak ada menemukan data-data K3S hasil produksinya Pak, itu mungkin saya lihat *nggak* ada perusahaan-perusahaan K3S dengan jumlah produksinya Pak ya.

Dan berikutnya saya nomor 17 Pak, halaman 17, halaman 17 ini Bapak-bapak melakukan audit kinerja *gitu* Pak ya. Di sini ada 5 item yang harus diaudit, saya mau tahu juga sampai mana audit Bapak terhadap kinerja K3S ini dengan sesuai dengan pencapaian target mereka *gitu* Pak.

Kita kan mau tahu juga karena Bapak nyampaikan ada audit, terus bagaimana audit ini *gitu* loh. Buktinya apanya produksinya masih seperti itu juga, bukan meningkat *gitu* pasti ada masalah di sana. Itu yang ingin kita tahu,



jadi apakah ada masalah internal atau masalah alat, atau sebagainya, tapi saya pikir manusia juga SDM juga penting untuk dilihat bagaimana mereka produktivitasnya *gitu*.

Jadi itu yang mau saya tau Pak Dwi, agar data-data tersebut bisa disampaikan ke kita karena bagaimanapun K3S ini, produktivitas K3S ini harus kita ketahui bersama. Apalagi SKK juga selalu melakukan audit secara rutin, itu yang saya kira biar kita melihat lebih dalam lagi.

Yang terakhir Pak Dwi, terkait dengan saya terus terang saja kalau terkait apa hulu energi ini saya harus banyak belajar Pak Dwi, tapi kalau di retail saya mungkin bisa kuasai. Nah ini ada terkait pengelolaan anggaran *cost recovery* dan *gross split*, saya *ndak* tahu sampai, apa perbedaan yang lebih mendalam *gitu* loh.

Apakah hanya terkait dengan biaya saja, apa manajemen seperti itu, saya juga terus terang saja belum begitu mendalam. Mohon penjelasannya nanti, karena apa? saya hanya kekhawatiran begini Pak Dwi, kalau *cost recovery* mungkin bisa dikendalikan oleh SKK ya dalam manajemennya, *cost recovery* tapi yang *gross split*-nya *gitu* loh, apakah SKK bisa campur didalamnya *gitu* secara pengelolaannya karena ini kemarin saya juga kita ada RDP dengan Pak Wiko terkait dengan adanya di Rokan sana Pak. Saya kan orang Kadin Pak, jadi ada pengaduan terhadap penawaran tender di Rokan *gitu* karena ada nama-nama orang tertentu yang menjadi *king* di sana. Jadi kita mau tahu apakah SKK ini bisa campur di sana *gitu* loh.

Jadi maksud saya hal-hal ini kan bisa gangguan juga ya bagi kami sebagai teman-teman sebagai pengusaha di Kadin jadi terganggu, ada namanya Erwin, ada namanya siapa lagi tuh, ada Frans Jono ini kan perlu tahu, ini sekadar informasi aja Pak, dari teman-teman Kadin *gitu* loh.

Jadi maksud saya apakah SKK bisa masuk ke sana *gitu* dengan *gross split* ini, Rokan *gross split* Pak ya, nah itu, maksud saya *begitu* loh. Kalau mungkin yang *cost recovery* mungkin bisa Bapak pegang *gitu* ya, tapi kalau ini bisa *enggak* tapi kan gangguan juga Pak, kan ini gangguan juga *gitu* loh.

Kira-kira itu aja Pak Dwi beserta jajarannya.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terima kasih Pak.

**F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):**

Pimpinan, sedikit aja tambahan.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**



Begini sekali terakhir Abang, kita skors aja dulu 15 menit, Ishoma, segala macam, baru nanti kita kasih kesempatan kepada beliau-beliau ini untuk merespon, oh masih ada lagi alam gaib? *Oke, oke.*

Terakhir Bang Nasril tanpa r, tanpa s.

**F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):**

Terima kasih Pimpinan.

Tambahan Pak Kepala, banyak isu yang menarik tadi yang disampaikan tadi oleh teman-teman terdahulu termasuk juga yang saya sampaikan. Tolong Bapak tahu *nggak*, jadi *nggak* perlu dijawab hari ini Pak ya. Tolong ada kajian, topiknya sederhana aja Pak, bagaimana ke depan SKK Migas ini nempel nomenklaturnya di Kementerian ESDM. *Nah* itu dulu, sehingga kajian Bapak ini ya merupakan nanti masukan, baik daripada kajian hukumnya maupun kepegawaiannya.

Sehingga beberapa keluhan dan persoalan koordinasi *interdept*-nya dan negosiasi kontraktor juga, negosiasi investor ini bisa kuat, itu alasannya. Nempel, nomenklaturnya nempel, apakah bentuknya nanti seperti hari ini ya tapi udah nempel.

Jadi Bapak tidak kesusahan di dalam melakukan koordinasi *interdept* maupun ininya bernegosiasi dengan para investor karena pengalaman saya Pak, waktu membentuk Undang-Undang 25/2007 tentang Investasi ketika kami bertemu dengan *member* dari Kadin Amerika itu yang memimpin apa ini, memimpin delegasi ini Komisi VI waktu itu, Amerika terus terang saja kepada kita yang berkonsultasi di Kadin Amerika, dia sederhana aja. Kami mau bernegosiasi dengan Presiden seperti yang lalu, artinya waktu di zaman Soeharto kan begitu, artinya apa? Final dan putus.

*Nah* hari Indonesia ini di pasca reformasi ini kan berbeda Pak, banyak perubahan Undang-undang. *Nah* ini artinya apa ya, dengan dijadikannya Undang-Undang Investasi Undang-Undang 25 Tahun 2007 ini tidak mampu bernegosiasi, kenapa? Karena dipimpin oleh seorang kepala, bukan dipimpin oleh seorang Menteri, itu alasannya.

*Nah* kemarin di 2019 presiden langsung mengangkat BKPM itu sebagai Menteri Investasi, artinya apa? Ini yang mampu bernegosiasi. Makanya pertanyaan kami ataupun kajian yang kami berikan adalah bagaimana SKK Migas itu nempel di Kementerian ESDM nomenklaturnya, tidak berdiri sendiri.

Itu saja Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terima kasih Pak Nasril.



Iya oke gini kita sepakati ya terakhir Pak Mul, kita skor 15 menit untuk Ishoma baru nanti kita langsung buka forum lagi, langsung kita kasih kesempatan ke teman-teman SKK untuk merespon dan kita ambil kesimpulan.

Silakan Pak Mul, *monggo, monggo* Pak Mul.

**F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):**

Terima kasih Pimpinan atas waktunya, dari alam gaib.

Terima kasih Pak Dwi dan teman-teman sekalian.

Saya ringkas saja hanya menggarisbawahi beberapa yang sudah disampaikan Pak Maman saya rasa kesimpulan ya. Jadi bagi kami menganggap ini ke depan di era senjakala industri migas ini, maka perlu rumusan *grand* strategi baru program migas nasional, perlu *grand* strategi baru karena apa? Yang pertama menurut kami, yang terjadi isinya bukan penurunan *lifting, lifting* sudah turun terus tapi yang utamanya adalah SKK Migas tidak mencapai target yang sudah turun itu.

Jadi dengan kerja yang masif, agresif, super aktif, responsif dan sebagainya tetap tidak mampu naik, hanya mampu menahan *natural decline*, hanya itu yang sampai. Harus bagaimana caranya untuk naik, mau tidak mau ada gerakan besar tapi tidak mungkin dilaksanakan karena investasi besar. Sementara apa yang terjadi hari ini insentif terbesar industri migas adalah harga minyak yang naik, itu pun tidak bisa menunjuk investasi, hanya untuk bayar utang, operasi hal kecil-kecil atau investasi ke arah energi baru terbarukan, senjakala industri minyak.

*Nah* kemudian di tengah kondisi seperti ini yang terjadi adalah ketidakpastian hukum sehingga menimbulkan hengkangnya pengusaha minyak, seperti Total, Chevron, Conoco Phillip dan terakhir Shell kasus di, kasus Blok Masela Abadi.

Kepastian hukum ini yang menyebabkan investor ragu-ragu, kabur itu kesimpulan Pak Maman saya sangat setuju. Jadi bagaimana caranya menarik investor besar untuk meningkatkan *lifting*, apalagi mencapai 1 juta barel tahun 2030 sementara kesungguhan kita *nggak* ada. Pemerintah *nggak* sungguh-sungguh, *nggak* ada *political will* ke arah itu.

Jadi saya usulannya konkrit Pak Maman, saya setuju untuk segera menggenjot RUU Migas ini terutama mendorong keseriusan pemerintah, jangan sampai kayak RUU EBET lagi, DIM-nya juga *nggak* ada, Pak Ridwan sering mengeluh seperti itu. Kita sudah siapkan **...(suara tidak jelas 2.38.34)...** tanpa DIM ini kan apa, barangnya bodong ya, *nggak* bisa kita bahas.

Jadi untuk bisa menata kelembagaan sebagaimana amanat MK, sudah jelas SKK Migas itu hanya sementara unit kerja di bawah ESDM itu sementara, kita harus undang RUU Migas ini membentuk kelembagaan yang ideal. Namun



di tengah kondisi senjakala industri migas, ini yang harus kita tata dengan baik, kalau *nggak* saya khawatir Andaman mengulangi kasus Abadi Masela nanti akan begini-gini terus persoalan kepastian hukumnya.

Demikian Pak Maman, saya setuju dengan pandangan Pak Maman dan Pak Sartono terakhir.

Demikian.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Memang kita ini dalam konteks ide selalu sama Pak Mul, cuma sayangnya ini kita belum koalisi-koalisi ini.

Terima kasih banyak Pak Mul.

Saya pikir tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, Bapak *enggak* usah respon dulu Pak, karena memang udah jam 1 lewat jadi kita skor 15 menit, nanti ishoma segala macam, sekalian relaksasi, habis itu baru kita lanjut langsung Bapak respon, kita tutup dengan kesimpulan Pak ya.

Terima kasih banyak, RDP Komisi VII dengan SKK Migas kita skor sampai kurang lebih 15 menit untuk menjalankan ishoma.

**(RAPAT DISKOR PUKUL 14.05 WIB)**

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat siang,  
Salam sejahtera.

Skorsing ishoma RDP saya cabut.

**(SKOR RAPAT DICABUT PUKUL 14.20 WIB)**

Terima kasih Bapak-bapak dan teman-teman Anggota.

Sesuai dengan kesepakatan tadi kita *explore* teman-teman komisi memberikan pendapat, pandangan, namun kita skor untuk ishoma dan selanjutnya kita serahkan kepada teman-teman SKK Migas untuk merespon secara *general* aja Pak, poin-poin pentingnya baru setelah itu kita akan masuk ke kesimpulan. Mengingat memang kita udah agak mundur kurang lebih 30 menit dari jadwal karena habis ini kita ada agenda dengan teman-teman pelaku tambang.

Maka silakan Pak.



**KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**

Terima kasih, Pak Pimpinan.

Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati.

Kami memberikan respon hal-hal yang pokok seperti tadi arahan Pak Ketua, yang pertama mengenai proses RUU Migas hampir semuanya tadi menyebut hal tersebut. Kami dapat melaporkan bahwa di Kementerian ESDM juga terus melakukan pengkajian hal ini dan posisinya terakhir kami sudah cek hari kemarin bahwa Kementerian ESDM menunggu draf proposal dari DPR, mudah-mudahan ini kami sudah komunikasi tadi, mudah-mudahan bisa disampaikan segera.

Yang lain mengenai progres tadi *project* yang berkaitan dengan Abadi Masela juga kami sampaikan *report*-nya, kami juga terus mendesak untuk bisa segera menjalankan. Kami sudah menyebut mengistilahkan adalah jangan sampai negara tersandera, jadi ini yang kami sampaikan kalau tidak ya di lepas aja karena kami juga banyak juga peminat-peminatnya. Jadi ini Abadi Masela bukan sesuatu yang tidak ada peminatnya, tetapi tentu saja masih terkait dengan hal-hal yang dengan hukum.

Kemudian mengenai tantangan dan apa hal-hal yang masih *pending matters* agar untuk meningkatkan ketertarikan investor, ini kami akan susulkan dalam jawaban tertulis dan juga kami memonitor terus proses untuk untuk menuju ke 1 juta barel per hari itu seperti apa dan kami juga laporkan kira-kira kalau dari posisi minyak saat ini kita ketinggalan 50.000 barel oil per hari, dari sisi gas kita masih dalam garis yang kita targetkan untuk menuju satu juta tersebut.

Yang lain upaya-upaya untuk peningkatan tenaga kerja, kami akan terus tingkatkan. KSO dari Pak Lamhot tadi disebutkan ini juga menarik Pak, memang untuk jangka pendek ini salah satu yang bisa kita kejar adalah KSO. KSO ini sesungguhnya yang lama itu tidak begitu jalan karena *term and condition*-nya itu agak kurang mendukung terhadap investor atau partner yang mengerjakannya.

Jadi ini sudah dibahas selama 2022 ini dan sudah keluar *term* kondisi yang baru yang meningkatkan *split* mitranya dan sebagainya udah keluar. Dan kami sudah mendesak berkali-kali kepada Pertamina untuk segera, sudah direncanakan untuk tender tapi jumlahnya masih sangat kecil, jadi kami belum puas dan kami akan panggil lagi untuk mendorong agar KSO ini bisa dijalankan.

Mengenai audit *maintenance* nanti kami akan tindaklanjuti secara serius dan beberapa pipa yang bocor kami sudah dapat komitmen dari Pertamina grup untuk perbaikannya dipercepat. Memang salah satu yang masa-masa kemarin agak menghambat dari para GM-nya karena *gross split*, jadi

anggarannya sangat dibatasi dan ini kami sudah sepakat dengan Pertamina Hulu Energi untuk bisa mempercepat.

Saya terima kasih atas segala informasi dan masukan dari Bapak-Ibu sekalian, yang kami jadikan arahan untuk tindak lanjut perbaikan pengelolaan hulu migas di Indonesia ini dan untuk itu saya kembalikan ke Bapak Pimpinan, dari teman-teman masih ada tambah-tambahan, cukup ya.

Saya rasa demikian Pimpinan, terima kasih.

**F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Interupsi Pimpinan, sedikit.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Silakan Pak Nasir.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Makasih Pimpinan, tadi kami tetap berprinsip kalau regulasi SKK tidak sesuai yang kita inginkan untuk menciptakan kajian dan temuan-temuan lokasi-lokasi blok yang baik sesuai dengan teknologi yang harus diciptakan di SKK. Menurut saya regulasi anggaran yang dikeluarkan oleh SKK ini perlu adanya panja dan pendalaman menurut saya.

Mungkin itu saja *sih* Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terima kasih Pak Nasir.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya Mbak Mercy kawannya BMW.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Sekarang jadi oplet, harga minyak lagi mahal.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pak Kepala SKK Migas Pak Dwi dan seluruh jajaran,



Pak Maman sebagai Ketua Rapat dan seluruh Bapak-Ibu Anggota Komisi yang saya hormati.

Saya minta maaf sebelumnya karena tidak hadir di rapat paginya karena lagi terima audiensi dari Seram Bagian Timur dan dapat saya sampaikan salah satunya ini memang berkaitan dengan urusan seismik migas yang ada di Seram Timur. Berkali-kali peristiwa ini sudah apa namanya berlarut-larut mulai dari di daerah karena tidak tersumbat, tidak dapat solusi tadi mau masuk ke sini Kepala Dinas ESDM provinsi baru saja telepon dan kita masih bicara panjang lebar lagi.

Harapan kita Pak, mohon perhatian saya diskusi panjang dengan Pak Bagio, minta kronologisnya karena mereka melakukan ini memang baru dalam tahap survei. Maaf ya mungkin agak keluar, tapi ini masih berkaitan dengan urusan *proven reserve* untuk hulu migas. Jadi karena ini dengan PT Bank Energi masih berkaitan dengan urusan seismik, belum eksplorasi, belum produksi tetapi karena itu dilakukan di daerah sakral, daerah pegunungan Pulau Seram yang sangat sakral untuk kita satu Maluku ini Pak.

Mohon dengan sangat Pak, Bapak tadi menyatakan bahwa tersandera, saya lebih-lebih tersandera lagi baru saja rapat tadi di Banggar dengan seluruh Anggota DPRD dari Seram Timur, Pak. Jadi mohon supaya ini dapat diselesaikan dengan baik, sehingga urusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat adat.

Hak ulayat adat masyarakat yang ada di sana dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, masalah investasi untuk kepentingan *proven reserve* hulu migas ini juga dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang kedua, saya minta dengan hormat Pak Dwi saya ini tidak mau marah tapi Bapak tolong kasih catatan ke PT Bank Energi, "Jangan sampai saya marah dan orang Maluku marah", datang baik-baik hormati adat istiadat kita. Mereka udah ketemu dengan semua pihak,

**KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**

PT apa Bu?

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

PT Bank Energi, mereka udah ketemu dengan semua pihak. Kemarin itu juga sudah turun juga dengan Pak Bagio, dengan dari provinsi, dengan sudah ada pertemuan dengan Pemda tetapi sampai dengan hari ini masih tarik-tarikan.

Kemarin waktu saya masih di Mesir untuk COP27, mereka demo besar-besaran, bakar ban dan segala macam, hancur besar-besaran, viral di mana-mana. Saya mohon supaya masyarakat menangkap bahwa kita serius, artinya kalau masyarakat adat dari pegunungan itu yang datang sampai di sini. Itu



artinya dari bawah sampai di provinsi udah tidak mungkin lagi menjawab persoalannya, kita bernegara Pak. Jadi kalau mereka datang sampai di sini mestinya terselesaikan. Ada yang bisa diselesaikan berdasarkan mekanisme negara, kalau *nggak* bubarin aja ini negara. Itu yang pertama, Pak.

Yang kedua berkaitan dengan masalah Blok Masela, masalah Blok Masela saya kira ini sudah perjalanan panjang sekali. Masalah hukum Pulau Nustual ini dengan masyarakat adat Desa Latdalam, Pulau Yamdena supaya ini dia bisa jalan. Semua pihak bertanya-tanya kepada saya juga kenapa Blok Masela tidak jalan-jalan sampai dengan sekarang ya memang terhambat karena masalah hukum yang belum tuntas.

Hasil koordinasi terakhir dengan Pak Bagio juga bahwa dua mekanisme dilakukan, waktu tahap pertama. Saya kira supaya Pak Maman sebagai ketua dan kita semua terhadap masalah Blok Masela, ada satu situasi yang cukup sangat menyedihkan sesungguhnya. Pada saat pembahasan berkaitan dengan masalah pelepasan hak tanah ketika gubernur mengeluarkan surat berkaitan dengan penentuan penetapan wilayah untuk *onshore base*-nya itu bupati pada saat itu kemudian melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, kan mereka maju dengan keputusan per meter persegi Pak Ketua dan Bapak-Ibu sekalian, 100, 978 atau 100 sekian itu 78 atau 176.000 per meter persegi rupa-rupanya tidak diterima.

Sementara untuk Polres, untuk seluruh bangunan-bangunan vital nasional lain yang masuk di Pulau Yamdena itu mereka beli dengan 200.000 dan 250.000 per meter persegi Pak. Ini *impact* perusahaan besar seperti ini korporat dengan angka turun seperti ini 170 sekian merasa berkeberatan karena saya kira SKK Migas menjadi bagian dari sini, operatornya ini dari menteri apa namanya BPN ya Badan Pertanahan, kemarin kita baru ketemu juga dengan Kementerian ATR BPN saya kasih tahu juga ke Pak Bagio karena mereka juga minta untuk pertemuan ke sana.

Ternyata kan ketika dibawa ke Pengadilan Negeri, dibawa ke Pengadilan Negeri Industrial dimenangkan untuk 176 itu kemudian di eksekusi karena dianggap cukup pantas lah untuk NJOP apa namanya, NJOP pasar, NJOP apa lah istilahnya ya, dimana rata-rata semua yang membeli dengan angka kira-kira seperti itu. Begitu dibawa naik ke mahkamah, dibawa naik ke kasasi turun sampai dengan 14.000 *cuman* dari 179 sekian, turun jadi 14.000. Ini memang sungguh tidak adil, Bapak-bapak kalau punya tanah seperti itu, Bapak-bapak kalau ada di posisi saya seperti itu pasti amat sangat terganggu sekali, apalagi satu pulau mau dilepas dengan harga cuma 14.000 Bapak-bapak.

Kemarin setelah koordinasi sangat panjang, mengecek seluruh hasil pertemuan-pertemuan saya minta seluruh kronologis dikirim. Pak Bagio mengirim seluruh kronologisnya dapat lah 2 mekanisme karena sudah diputus di kasasi 14.000 rupiah itu tidak mungkin dibayarkan di luar angka itu kalau *nggak* berhadapan dengan KPK. Maka diterbitkanlah satu kebijakan yang lain dalam bentuk kompensasi, yang angkanya kira-kira memenuhi sisa kekurangan yang ada.

Dalam koordinasi dengan masyarakat ini mungkin harus dibijaki dengan baik, dua-duanya ini harus berjalan bersamaan, tidak salah satu sebab salah satu saja yang jalan dan satu tidak jalan, ini dianggap penipuan terhadap masyarakat karena mereka melepas satu pulau ini Pak. Mereka mungkin ada sedikit saja yang tinggal di situ atau tapi mereka bercocok tanam, mereka punya hasil kebun semuanya di sana.

Jadi mohon dengan sangat kita mendukung penuh upaya perkuatan hulu migas yang ada dan saya kalau ditanya saya ingin percepat juga Blok Masela ini bisa jalan. Tapi karena ini hak ulayat masyarakat adat, mohon juga diberikan pengertian yang terjadi benturan dianggap semuanya menjadi tanah negara lah, hutan negara dan sebagainya seperti itu.

Jadi mohon mungkin ini bisa diatur dengan baik supaya tidak lagi menimbulkan gejolak Pak Dwi, saya mohon sangat, dengan sangat supaya setelah saya turun berkali-kali ke KKT sudah ada satu kepastian dimana masyarakat tidak merasa dirugikan. Masyarakat KKT sesungguhnya sangat menantikan *project* ini dia berjalan Pak, segera produksi, tetapi urusan masalah hukum ini bisa dituntaskan dengan seadil-adilnya.

Saya berharap SKK Migas Pak, itu tidak berpihak kepada hanya korporat semata, kepentingan korporat, ini karena tidak ada keberpihakan. Setiap keputusan pasti ada nilainya Pak, kita memberi nilai di dalam setiap keputusan. Saya menganggap ini tidak ada keberpihakan sedikitpun dengan dia jatuh turun sampai 14.000, saya kira ini terlalu menyakitkan. Saya ikutin benar terus sampai dengan keputusan keluar di Pengadilan Industri Negeri begitu naik di kasasi balik ke 14.000, yang pertama saya dapat apa? Maki-makian Pak, saya yang dapat bukan Bapak. Mereka tahu saya ada di sini.

Jadi terhadap situasi ini saya mohon untuk ini bisa diselesaikan dengan baik dan urusan ini bisa segera kita tiba pada konstruksi dan dalam waktu yang kita harapkan ke depan produksi bisa jalan soal masalah Blok Masela.

Yang ketiga Pak, di Banggar dalam rapat yang paling terakhir, baik dalam rapat resmi maupun rapat yang tidak resmi, kita yang di Komisi VII ini datang ini satu pasukan lengkap dari Komisi VII datang mengawal semua yang ada di sana, kita tutup mata Pak dengan *cost recovery* sebesar kayak begini, sementara *lifting* turun jauh sampai dengan 620 kita putus kemarin.

Harapannya Pak, dengan keputusan kemarin tetap dengan *cost recovery* setinggi ini mestinya progresif 620 jadi tidak konservatif bahwa ini turun, turun, turun sementara *cost recovery* naik terus, naik terus, naik terus ini sangat tidak realistis sedikitpun. Kalau mau modelnya kayak begini harus semua di sini harus ada satu apa kepastian, kebijakan berani yang keluar dari Komisi VII ini yang menyatakan bahwa urusan migas tidak lagi menjadi *primary energy*. Kalau mau model kayak *gitu* 2-3 tahun, 5 tahun ke depan mungkin sudah dibawah 300 ribu barel per *day*. Kita udah *enggak* bisa bicara lagi untuk kepentingan *renew* bagi negara dan lain-lain.



Sementara dalam situasi yang masih ada sekarang ini Pak maman dan semua kawan-kawan, kemarin itu kita ikuti sampai rapat ini, bahwa 620 ribu barel per *day* ini saya sampai tunjukkan masih ada sekitar sekian proyek-proyek strategis yang harapannya mungkin sudah bisa COD dan seterusnya. Belum bisa kita hitung masuk, terakhir masih koordinasi dengan Pak Doni, belum bisa dihitung masuk semuanya karena taruhan kita berkaitan dengan masalah *lifting* migas yang ada di sana dalam konsepnya dengan masalah *cost recovery*.

Jadi Pak Dwi tanggung jawab kita besar loh pak Dwi, Bapak ada di SKK Migas mengurus hulu migas, kita yang ada di Komisi VII tanggung jawab legislasi, tanggung jawab *budgeting* kita yang ada di Badan Anggaran sungguh-sungguh sangat tidak mudah. Kelihatan di permukaan rapat itu ketok sudah aman, air tenang, tetapi sesungguhnya kalau kita buka-bukaan ini minta maaf tapi ini memang kejadian.

Jadi sebelum kesimpulan ini nanti diambil, 1 kesimpulan khusus untuk ini harus keluar Pak Ketua berkaitan dengan masalah *lifting* migas ini harus progresif, harus naik, jadi tidak berdasarkan apa yang kita putuskan. Kalaupun dia naik wajar, tanggung jawab kita *koq* memang bikin naik, bukan hanya sekedar memastikan ada angka yang diputuskan di APBN. Ini tanggung jawab kita ngurus negara ngurus energi satu Indonesia Raya ini.

Kalau nanti tahun-tahun depan lagi turun jauh lagi, saya sudah tidak tahu lagi bagaimana pertanggungjawaban Komisi VII kita, karena sudah tidak lagi, *nggak* tahu mau pakai justifikasi apa mengamankan di Badan Anggaran, sampai kemarin itu hanya karena masalah pasca Covid-19, berkaitan dengan masalah geopolitik Ukraina dan lain-lain, sudah lah masih ada banyak justifikasi. Tapi yang ke depan-ke depan ini apa justifikasi, kita hanya bisa bilang ini efisiensi di SKK Migas, banyak hal-hal yang tidak jalan sesuai dengan apa yang jadi harapan kita.

Saya kira ini 3 catatan besar saya, 2 yang berkaitan dengan urusan *proven reserve* di Maluku, satu berkaitan dengan Blok Masela, satu yang berkaitan dengan blok Bula non Bula yang berhadapan dengan suku Bati terhadap seismik migas yang ada di sana dan yang ketiga berkaitan dengan *lifting* migas sedapat mungkin naik signifikan sesuai dengan apa yang menjadi perencanaan SKK dan kita bersama yang ada di Komisi VII.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL  
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke, terima kasih Mbak Mercy.

Jadi luar biasa Pak, itu yang terakhir saya tambahkan Pak terkait *cost recovery*. Jadi yang perlu dipahami oleh teman-teman SKK Migas dalam setiap proses pembahasan anggaran, baik itu APBN maupun asumsi makro selalu memang salah satu yang paling membuat Komisi VII dengan Banggar tegang itu urusan *cost recovery*.



Itu Bapak memang betul tadi dibilang oleh Mbak Mercy jangan lihat di forum, kalau di forum ya kita udah selesai, tapi kalau dalam rapat-rapat informalnya selalu ributnya urusan itu aja Pak. Kalau saya tuh terakhir pengalamannya tahun lalu, kawan-kawan sekarang saya lebih banyak Pak Bambang Haryadi yang membangun komunikasi ke sana. Tapi kalau tahun lalu itu saya kebetulan yang terakhir pengalaman saya itu *nggak* mudah Pak.

Artinya untuk meyakinkan teman-teman Banggar terkait *cost recovery* itu, yang itukan kontradiktif kan sebetulnya, produksi turun tapi *cost recovery* kita, pikiran teman-teman di Banggar itu tetap seharusnya turun juga *gitu*, tapi kita jaga terus juga dengan angka. Terakhir itu kalau *enggak* salah 8,63 miliar ya yang kita putuskan, nah dengan produksi 690, 650, berapa? 660.000 barel per hari.

Artinya betul Pak, ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama bukan hanya sekedar Bapak tapi kita Komisi VII. Jadi terus terang kalau dalam konteks *cost recovery* sebetulnya Komisi VII punya hak untuk maki-maki Pak, untuk marah-marah dengan Bapak-bapak semua karena itu menjadi salah satu wajah Komisi VII di Badan Anggaran dengan teman-teman komisi lainnya.

Jadi itu yang mungkin saya sama dengan Mbak Mercy, penekanan saya juga terkait dengan komitmen SKK Migas didalam merealisasikan peningkatan produksi di tengah kondisi anggaran *cost recovery* kita, tetap kita jaga di angka yang memang cukup proporsional sebetulnya.

Selanjutnya, saya pikir cukup ya kita masuk ke kesimpulan, tapi ini silakan aja dulu, drafnya nanti banyak redaksi-redaksi yang mau kita ubah-ubah.

Terakhir memang Pak, saya menambahkan dan menegaskan lagi RUU Migas itu memang tampaknya sederhana mungkin bagi orang, tapi itu momentum sebetulnya. Saya selalu bilang Bapak buat target 1 juta barel per hari tapi kalau *nggak* ada momentum besar untuk mendorong itu *nggak* akan jalan Pak, hari ini industri migas kita butuh momentum besar untuk menyadarkan semua orang bahwa yuk kita siap *cost recovery gitu*.

*Nah* ini memang yang harus diciptakan Pak, jadi efek kejutnya sebetulnya memang yang harus dimunculkan. Jadi saya tambahkan tadi ada yang kurang, artinya RUU Migas itu bukan hanya sekedar menjadi pembahasan RUU Migas saja tapi menjadi salah satu momentum kejut untuk segenap seluruh stakeholder di *oil and gas industry*. Jadi pada saat RUU ini disahkan, tok, ada efek kejut yang memang terjadi di *oil and gas industry*. Jadi ini memang yang kita butuhkan untuk menjadi magnet para pelaku-pelaku industri di migas.

Sekarang kita masuk di poin pertama, draf kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan SKK Migas.



1. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala SKK Migas untuk menaikkan realisasi *lifting* migas lebih tinggi dari target APBN.

*Nah* ini mungkin Mbak Mercy redaksinya bisa ditambahkan Mbak.

**F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):**

Pimpinan, kalau menurut saya poin 1 ini *nggak* usah ditulis, malu kita, *nggak* usah ditulis karena Rapat Dengar Pendapat kemarin begini juga, sama aja. Faktanya hari ini *nggak* ada peningkatan *lifting* iya kan, *nggak* ada. Jadi menurut saya seperti kata Pak Maman itu kita *nggak* jelas, kita yang bego, atau siapa yang bego *gitu*. Kesalahan ini kita ulang lagi, kita bikin lagi, jadi kalau kayak gini-gini ini dia merasa apa ya *nggak* punya beban.

Mendesak Kepala SKK Migas untuk menaikkan realisasi *lifting* migas, tahun lalu begini juga iya kan, *nggak* ada juga, sama juga. Jadi mending *nggak* usah ditulis, kecuali kita pakai ada target itu tidak tercapai, mundur, beda lagi cerita. Inikan *nggak* ada, mau naik apa mau *nggak* ini. Kita paksa pun naik tapi faktanya *nggak* naik gimana, kita udah jelas kok penugasan SKK Migas itu meningkatkan produksi, mencari cadangan baru, mengefektifkan lahan-lahan yang sudah ada untuk ditingkatkan produksi. Tapi faktanya *nggak* ada.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke, baik.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Sedikit.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Silakan Pak Nasir bukan Pak Nasril.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Makasih Pimpinan.

*Nggak* kesimpulan ini kan tadi kita sampaikan bagaimana SKK ini menjual lahan minyak kita ini supaya investor tertarik, itu yang paling penting poinnya, apa yang harus dilakukan. Kalau di pertambangan itu namanya GORC, apa yang dilakukan oleh SKK ini untuk melakukan kajian, penelitian, orang-orang pintar dihadirkan di SKK ini untuk mencari untuk mencari *lifting*, untuk mencari sumber-sumber minyak yang kualitas *lifting*-nya besar. Kalau *nggak*, gimana kita mau meningkatkan, kesimpulannya *gitu* Pak Maman.



Jadi kita minta SKK ini didorong untuk mengerjakan bagaimana mencari sumber *lifting* yang baik dan kualitas blok yang benar-benar bisa dibuat perusahaan-perusahaan investor itu tertarik, untuk lokasi sumur-sumur kita yang ada di Indonesia ini *gitu*, itu yang paling penting. Jadi kalau *cuman* begini saja tadi kan sudah disampaikan bahwa kita ini rugi membentuk SKK ini.

Kita minta Deputy Perencanaannya ini harus kerja, apa sih yang dilakukan *gitu*. Kita minta dia membentuk tim meng-*hire* orang-orang pintar dari luar untuk nanti masa persidangan berikutnya kita sudah dapat jawabannya *gitu*, bahwa blok ini Pak, ini tertarik mereka akan kontak dengan kita. *Nah* ini kan uang masuk ke negara kita *gitu*, kesimpulannya *gitu* Pak Maman.

Jadi kita minta SKK dari Deputy Perencanaan ini membentuk tim untuk melakukan kajian dan pengeboran untuk regulasi seluruh blok, untuk mengkaji berapa jumlah *lifting* dan kandungan *crude* kita yang ada yang bisa kita segerakan untuk menjadi penghasilan negara.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke, terima kasih Pak Nasir.

Jadi poin nomor 1 kita hapus aja ya.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Pak Ketua, Pak Kapoksi saya kira untuk poin nomor satu ini karena dia mandatory ke SKK Migas, kita mau ribut-ribut, bagaimana pun ini *mandatory*-nya ini sebenarnya jantung dari seluruh aktivitas SKK Migas ada di poin 1 ini.

Mungkin kita buka aja, jadi kita buka-bukaan aja dengan Kepala SKK Migas untuk menaikkan realisasi *lifting* migas, jangan pakai bahasa lebih tinggi. *Lifting* migas dari target APBN, melalui, pastikan dari berapa *project* strategis nasional yang sudah bisa COD itu berapa banyak. Berapa banyak untuk menambahkan *lifting*, saya lihat di sini ada 50.000 ditambah dengan 12 yang lain, hitung semua baru kita masukkan di poin 1. Jadi konkret itu bahasanya, jadi tidak lagi bahasa ngambang seperti begini, kita gagah *gitu* loh kalau lihat di poin 1 udah konkret.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Begini Mbak, konkritnya gimana, kata-katanya, redaksinya, kita langsung redaksi aja jangan dielaborasi.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Komisi VII DPR RI mendesak SKK Migas untuk menaikkan realisasi *lifting* migas dari target APBN sesuai dengan perencanaan untuk titik-titik berapa banyak proyek strategis nasional hulu migas yang COD per akhir 2022



ini atau per bulan tahun 2023 misalnya itu berapa banyak, tolong dimasukkan di sana.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Nggak* begini *sorry*, kita bersepakat udah tetap kita masukkan bagian dari komitmen kita. Namun redaksi sesuai, jadi begini langsung masuk ke redaksinya aja.

Komisi VII DPR RI mendesak Kepala SKK Migas untuk menaikkan realisasi *lifting* migas dari target APBN sesuai dengan perencanaan.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Perencanaan untuk apa namanya kepastian atau percepatan *commissioning* dari berapa belas proyek hulu migas, tinggal ngisi berapa proyek di hulu migas dengan menambah titik-titik barel per *day* yang totalnya menjadi sekian *gitu* loh dari angka yang sekarang ini ditambah dengan proyeksi untuk COD-nya itu berapa banyak, itulah yang menjadi target evaluasi kita.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ngerti maksud saya kata-kata konkretnya Mbak.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Ini yang tadi saya udah bilang, uraiannya itu ditambahkan.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Sesuai dengan perencanaan untuk.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Perencanaan untuk proyek *onstream* 2022 sebanyak 12 proyek, sebanyak 12 proyek, sebanyak 12 proyek *onstream* 2022 dengan potensi penambahan 19 ribu BOPD dan 567 MMSCFD. Kemudian proyek strategis nasional, saya *nggak* tahu ini sudah masuk atau belum, kita masukin semua tambahan produksi 65 BOPD 3484 MMSCFD.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Sebentar, tenang, ini memang kalau mobilnya Mercy cepat, kalau saya selalu mobilnya Honda saya.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**



BOPD 6.000, 19.000, iya 12 *project*.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Sesuai dengan perencanaan untuk 12 proyek *onstream* tahun 2022 dengan potensi penambahan 19.000 barel oil per *day*

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENS, S.T.):**

Dan 567 MMSCFD, kemudian koma atau apa namanya titik koma, bisa koma atau titik koma. Project strategis nasional, saya *nggak* tahu *project* strategis nasional ini sudah masuk di tambahan atau belum *gitu*, tapi kita masukin aja, sudah belum Pak.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Nggak* apa-apa dibuat aja dulu redaksinya nanti kan.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENS, S.T.):**

Tapi kita masukin aja supaya itu jadi bahan evaluasi, sudah masuk atau belum kita masukin. *Project* strategis nasional 2022, *project* strategis nasional 2022 dengan tambahan produksi 65.000 BOPD dan 3.484 MMSCFD.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke, cukup?

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENS, S.T.):**

Untuk sementara iya.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Silakan Pak, ini dikritisi aja kata-kata redaksinya. Saya ulangi ya,

Komisi VII DPR RI mendesak kepala SKK Migas untuk menaikkan realisasi *lifting* migas dari target APBN sesuai dengan perencanaan untuk 12 proyek *onstream* tahun 2022 dengan potensi penambahan 19 ribu barel oil per *day* dan 567 MMSCFD, serta *project* strategis nasional tahun 2022 dengan tambahan produksi, gimana Pak coba dilihat.

**KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**



Kalau yang pertama yang mengenai proyek-proyek yang *onstream* itu sudah sesuai, yang untuk proyek-proyek strategis nasional ini yang tentu saja ini angkanya tidak bisa masuk tahun 2022 kan kita ketahui bahwa Jambaran Tiung Biru baru *onstream* sekarang dan nanti baru Desember akan *full capacity*, berarti dia akan berpengaruh di 2023.

Jadi dan itu Jambaran Tiung Biru pengaruhnya adalah tambahan gas 190 MMSCFD, sedangkan yang lain IDD kemudian juga bisa ditambahkan untuk tahun depan Tangguh Train 3 tapi itupun hanya satu semester untuk 700 MMSCFD dan 3000 barel kubik *feet*, barel oil per hari.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Jadi begini Pak ya, *sorry* saya potong mohon maaf.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Ketua atau kita buka aja Ketua, inikan APBN-nya Pak Kepala, APBN ini kan kita tidak taruh tahun anggarannya Pak. Jadi sebenarnya ini masih kasih ruang, tapi dengan catatan ini menjadi pegangan kita.

**KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**

Betul, jadi sesuai dengan rencana-rencana *onstream* dari masing-masing proyek strategis nasional ini *gitu*.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya, begini aja sesuai dengan perencanaan untuk 12 proyek *onstream* tahun 2022 dengan potensi penambahan 19 ribu BOPD dan 567 MMSCFD, sampai situ aja dulu ya titik karena kita bicara komitmen 2022. *Nah* yang serta *project* strategis nasionalnya itu saya pikir nggak usah kita masukkan karena kan masih belum jelas barang itu.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Pak Ketua, kan inikan dalam rangka menaikkan realisasi *lifting* migas di target APBN. Jadi APBN ini kan bukan APBN tahun fiskal, tetapi APBN berjalan. *Nah* bahwa untuk yang tahun 2022 untuk 12 *project* strategis nasional, tetapi untuk yang tambahan *project* strategis nasional, tambahan produksi 65 itu buat saya dibuka aja Pak Ketua, mungkin kita bisa apa namanya sedikit membedakan dikasih titik koma atau apalah seperti itu, tetapi kan urusannya ini kan bukan di 2022, urusannya kan target APBN Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya gini aja, saya butuh, gini Mbak penjelasannya *nggak* usah terlalu dijelaskan, masuk ke konkret redaksinya aja. Ini kan ada kata-kata tambahan



serta *project* strategis nasional yang notabene itu kan kita belum tahu realisasinya udah pasti *ndak* mungkin di 2022.

Artinya 2023 pun kalau tadi ukurannya Blok Masela, Bapak tanya saya hari ini 15 tahun lagi *nggak* mungkin itu Pak, saya berani taruhan ini biar ditonton sama publik ini. Saya belum mau dalamin itu Blok Masela, tapi kalau tanya ke saya Blok Masela itu 15 tahun lagi *nggak* bakal itu, yuk siapa yang berani taruhan, taruhan potong kuping saya berani, ini dikasih angin surga aja saya bilang *gitu*.

Jadi maksud saya yang.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Pak Ketua izin, sampai dengan 19.000 BOPD dan 567 itu dikasih titik koma di situ. Oke, serta percepatan.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Serta percepatan, oke nah ini saya setuju. Serta percepatan *project* strategis nasional dengan tambahan produksi 65.000 BOPD dan 3484 MMSCFD dan tanda kurung tadi disebutin ya *project-project* strategis nasional, masukin itu.

**KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**

Yang tadi dan percepatan proyek strategis nasional tadi sudah disebut di atas.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oh iya *oke*, jadi cukup Pak ya? *Oke*, saya ketok dulu ya poin nomor 1.

(RAPAT:SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)

Masuk poin nomor 2.

2. Komisi VII DPR RI

Apa tadi Bang Nasir tambahan pembentukan tim untuk mendukung kajian perencanaan tim profesional redaksinya.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Diminta SKK untuk membentuk tim kajian.



**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL  
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Tim profesional, tim ahli.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

*Nggak* deputi lah, Deputi Perencanaan ini kita minta untuk segera membentuk tim, bagaimana kajian tentang.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL  
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Gini mungkin bahasanya gini Pak, Komisi VII DPR RI mendorong Kepala SKK Migas untuk membantu tim ahli dalam rangka untuk memperkuat perencanaan pengembangan industri migas di dalam institusi SKK Migas.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Dan apa kondisinya ada berapa besar *gitu*.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL  
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya itu udah masuk, membentuk tim ahli dalam rangka untuk memperkuat peningkatan, memperkuat perencanaan.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Perencanaan dan deposit lah ya.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL  
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Perencanaan dan pengembangan, pengembangan potensi.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

*Eggak* potensi lagi tapi temuan dia, mendapatkan temuan.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL  
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Memperkuat perencanaan dan pengembangan lapangan didalam rangka untuk meningkatkan produksi nasional, cocok? Iya kan?.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**



Nggak kalau JORC itu kalau di batu bara dia udah barang yang pasti menjadi investor tuh tertarik dengan kondisi, jadi udah di.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Perencanaan dan pengembangan lapangan.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Jadi kajian ini dapat menemukan deposit yang besar untuk menarik investor, jadi menemukan bukan, jadi dikaji terus mendapatkan temuan, deposit *lifting* yang pasti *gitu* loh.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke, SKK Migas untuk membentuk tim ahli dalam rangka untuk meningkatkan temuan cadangan dalam rangka untuk (bos, balik ke atas bos) dalam rangka untuk meningkatkan temuan cadangan, *nggak usah, gue ga suruh lo* hapus itu, *gue* suruh tulis aja dulu.

Dalam rangka untuk meningkatkan temuan cadangan, meningkatkan temuan cadangan koma, koma, memperkuatnya hapus, meningkatkan temuan cadangan terus perencanaan dan

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Untuk menemukan.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Nggak* tadi udah meningkatkan cadangan, perencanaan dan optimalisasi pengembangan lapangan.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Temuan cadangan udah betul tadi.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Meningkatkan cadangan, perencanaan dan optimalisasi pengembangan lapangan migas nasional, cocok?



**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Temuan cadangan itu di mana.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Di atas itu, meningkatkan temuan cadangan, perencanaan dan optimalisasi pengembangan lapangan migas nasional.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Dan itu meng-*hire* tenaga-tenaga asing tadi.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ya itu, tim ahli itu baik lokal maupun.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Jangan lokal lagi nanti.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Apa tulisannya, tim ahli dalam tanda kurung.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Profesional dan dari tenaga yang profesional dan tenaga-tenaga asing yang sudah berpengalaman.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, ST.):**

Pak Ketua, izin.

Mungkin kita tanya dulu di tubuh SKK Migas sendiri sudah ada tim ahli yang berkaitan dengan urusan ini atau tidak, *informatory* saja. Kalau sudah ada formulasinya menjadi melakukan optimalisasi atau apapun bentuknya.

**KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**

Sudah ada Bu Mercy, tapi Pak Nasir menyampaikan upaya-upaya untuk memperkuat itu. Itu mungkin tadi kalau Bu Mercy memunculkan mengoptimalkan atau memberdayakan dan lain sebagainya dengan bekerjasama dengan pihak-pihak lain.



**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Ini SKK harus bekerja sama dengan perusahaan konsultan yang profesional, maupun di negara-negara mana yang sudah mempunyai keahlian untuk menghitung dan menemukan sumur-sumur blok baru itu.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T/ F-P.GOLKAR/ WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oh begini aja berarti bahasanya,

Komisi VII DPR RI mendorong Kepala SKK Migas untuk melakukan kerjasama dengan.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Konsultan-konsultan profesional.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Begitu* aja bahasanya Pak.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Iya karena kan batubara itu kan konsultan juga dia, perusahaan-perusahaan dari Australia itu.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke, udah titik yang profesional dalam rangka untuk meningkatkan temuan cadangan, perencanaan dan optimalisasi pengembangan lapangan Migas nasional, cocok ya?

**(RAPAT:SETUJU)  
(KETOK PALUL 1 KALI)**

Masuk ke-3.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Ketua, poin 2 ini mungkin kita bisa buka 2a dan 2b, jadi kalau 2a ini kan saya tangkap ini kan supaya memperkuat SKK Migas sehingga *performace* mereka terhadap kandungan cadangan dan apa sebagainya itu ada tambahan dukungan professional, teknologi dan lain-lain lah kira-kira seperti itu ya, untuk bisa lebih cepat.

Yang kedua, ini sesungguhnya kegelisahan saya bukan di soal yang, saya *nggak* tahu ya tapi sesungguhnya ini soal percepatan yang di hulu



migasnya ini, jadi seluruh seismik, seluruh tahapan-tahapan yang tadi dikembangkan, dijelaskan di depan ini saya lihat sebentar aja ya. Ini kan ada tahapan-tahapan, kerja-kerja seismik, mulai dari seismik *to be* sampai dan seterusnya seterusnya itu.

Pertanyaan saya, kan ini SKK kan namanya sudah namanya saja Satuan Kerja Khusus sebenarnya sudah *special, task force gitu* loh. Jadi kalau di dalam *special task force*, ada *special task force* lagi kan sebenarnya lucu Pak Dwi.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya Mbak, konkret aja karena mengingat waktu, mbak.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Konkritnya kalau saya boleh usul.

Komisi VII DPR RI mendesak Kepala SKK Migas untuk apa namanya, ini *nggak* tahu ya ada tim terpadu apa lagi yang bisa dipastikan didalam SKK Migas, untuk memastikan seluruh urusan-urusan yang berkaitan dengan kerja-kerja, mulai dari riset, eksplorasi dan lain-lain bisa cepat selesai *gitu* loh, intinya yang di sini.

Ada *spesial task force* yang sifatnya *integrated* atau apalah bentuknya yang kerjanya itu gebrak aja itu setiap saat, kalau masih ada yang masih lama, masih terlambat, masih segala macam. Mereka yang kumpulin data, masalahnya di mana, mereka yang kerja *gitu*. Kalau yang di sistem konvensional ini tidak jalan dengan baik *gitu* loh, kita ini kan *buying time*, 7 tahun atau 6 tahun lagi ini habis urusan migas kita ini. Saya *nggak* tahu nanti Pak.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Begini itu saya pikir, saya udah bisa nangkap maksudnya mbak siapa, Mbak Mercy. Intinya Komisi VII DPR RI mendorong Kepala SKK Migas untuk memastikan, untuk membentuk, untuk melakukan akselerasi, akselerasi percepatan implementasi dan realisasi program-program betul *nggak*? Akselerasi percepatan implementasi dan realisasi program-program yang berkaitan dengan peningkatan produksi nasional, saya pikir itu.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Peningkatan cadangan dan produksi nasional.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**



Yang berkaitan dengan peningkatan cadangan Migas nasional, peningkatan cadangan Migas nasional dan produksi nasional, sip ya, sisanya itu hapusin aja.

**(RAPAT:SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Masuk poin ke-4.

Komisi VII DPR RI mendesak, saya pikir yang ke-4 ini *nggak* perlu lagi nih, perlu lagi, udah *nggak* perlu poin 4, udah ada di atas itu, *delete* aja.

Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Kepala SKK Migas agar revisi Undang-Undang Migas segera diselesaikan sebagai payung hukum penguatan kelembagaan dan kepastian investasi hulu migas di Indonesia, setuju ya? Ada tambahan?

**F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):**

Batasan waktunya ya sesegera mungkin ini kan bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi tergantung perspektifnya. Kalau boleh usul selambat-lambatnya, ada kata selambat-lambatnya, mau bulan Januari atau Februari, terserah.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Nggak* ini yang dimaksud ini pengajuannya atau penyelesaian akhirnya menjadi undang-undang, pengajuannya berarti selambat-lambatnya di masa sidang terakhir, masa sidang selanjutnya.

**F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):**

Boleh kita ambil 2 opsi, kalau kita terima dulu dia dari awal selambat-lambatnya awal masa sidang 2023 dan berakhir pada akhir 2023. Jadi ada rentang waktu 1 tahun.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Coba konkretnya, Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Kepala SKK Migas agar revisi Undang-Undang Migas segera direalisasikan selambat-lambatnya apa.

**F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):**

Spesifik aja maksud saya Pak Ketua, langsung aja selambat-lambatnya Januari 2023. Ini kan untuk dimasukkan.



**F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):**

*Nggak* aku pikir Desember aja, kalau proses, jangan diselesaikan Ketua, menyampaikan.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Begini aja.

**F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):**

Begini, nomenklaturnya begini Pak Ketua.

Komisi VII DPR RI sepakat dengan Kepala SKK Migas agar rancangan undang-undang, revisi Rancangan Undang-Undang Migas segera disampaikan kepada Komisi VII atau DPR selambat-lambatnya awal.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Salah-salah bukan begini Pak Gunhar, justru revisi Undang-Undang Migas ini kita masuknya melalui inisiatif DPR RI.

**F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):**

Kalau inisiatif DPR kita mulai bahas.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya, jadi gini aja kalau menurut saya coret dulu Pak, disampaikan Komisi VII DPR RI itu coret dulu, agar revisi Undang-Undang Migas segera diselesaikan selambat-lambatnya bulan Juni 2023. Jadi kita langsung bicara tenggat waktu, jadi selesai berarti, sudah menjadi produk, produk undang-undang *gitu*. Segera diselesaikan selambat-lambatnya bulan Juni 2023 sebagai payung hukum penguatan kelembagaan dan kepastian investasi hulu migas di Indonesia, cocok setuju ya?

**(RAPAT:SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Nomor 5, Komisi VII DPR RI meminta Kepala SKK Migas untuk melakukan kajian opsi perubahan nomenklatur SKK Migas ke dalam, saya pikir *nggak* perlu ini nomor 5 ini, coret.

Masuk terakhir, Komisi VII DPR RI mendesak kepala SKK Migas agar meningkatkan kontribusi program pemberdayaan masyarakat oleh K3S di daerah.



Nah ini begini Pak, ini saya tekankan sekali lagi. Saya mau tanya dulu pak, ini kita interaktif ya. CSR K3S itu masuk *nggak* Pak dalam *cost recovery*, itu dulu Pak, *mandatory* ini di bawah siapa ya. Itu dulu Pak, kita interaktif aja.

**KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**

Bu Desti.

**SKK MIGAS (DESTI):**

Masuk Pak.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Masuk ya, *oke* masuk ya.

Saya pikir saya *nggak* ada kekhawatiran saya mengatakan ini, walaupun ini di ekspos oleh media. Kalau memang itu masuk dalam *cost recovery*, Komisi VII itu adalah bagian dari institusi resmi negara yang memperjuangkan *cost recovery* di SKK Migas itu naik Pak, di mana dalam salah satu tugas kami adalah memastikan bahwa yang mendapatkan *corporate social responsibility* K3S itu tidak hanya masyarakat yang ada di daerah penghasil minyak itu aja *gitu* loh.

Artinya apa? Melalui forum yang terhormat ini, saya mewakili teman-teman artinya apa? Harus ada kesepakatan dan komitmen di antara kita bahwa daerah-daerah yang tidak mendapatkan penghasil minyak itu juga berhak mendapatkan *corporate social responsibility* yang memang itu masuk dalam alokasi anggaran *cost recovery* kita, saya pikir itu Pak ya.

Jadi itu komitmen Pak diantara kita dan saya juga tidak perlu kita detailkan nanti didalam kesimpulan ini bahwasanya mungkin ada yang menganggap bahwa secara aturan tidak bisa, segala macam, *ndak* mungkin *ndak* bisa Pak, kenapa? Karena kalau Pertamina aja bisa, masa perusahaan-perusahaan yang lain *nggak* bisa, lah *wong* sama-sama penghasil minyak kok. Kalau misalnya Pertamina aja dia bisa mengalokasikan program CSR itu ke wilayah yang memang bukan wilayah migas saja bisa, masa misalnya di perusahaan seperti di Tangguh tidak bisa *gitu* Pak. Sedangkan itu semua *cost recovery*-kan *gitu loh* Pak, nah itu ya Pak.

Jadi saya harus sampaikan ini supaya ini bisa menjadi komitmen kita bersama karena isu ini sepemahaman saya sudah pernah kita bahas 2 tahun yang lalu Pak. Kami mengerti dan kami sadar sekali bahwa SKK Migas sudah mengalokasikan, namun yang bagi kami itu anggaran SKK Migas Pak, yang kita mau ini adalah anggaran komitmen dari K3S, bagian dari komitmen mereka-mereka untuk CSR di daerah-daerah lain.



Jadi bukan dari SKK Migas Pak, jadi kami *nggak* mau membebankan SKK Migas lagi sih sebenarnya tapi kami menginginkan dari K3S. Saya pikir itu ya Pak, jadi itu kita sama ya Pak, jadi biar dalam forum ini sama.

Poin ke-5, Komisi VII DPR RI mendesak bersepakat ya. Kita masukin kata-kata bersepakat, dengan Kepala SKK Migas untuk meningkatkan kontribusi program pemberdayaan masyarakat oleh K3S di luar daerah operasi migas.

**KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**

Di berbagai daerah.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Di berbagai daerah *oke*, di berbagai daerah di seluruh Indonesia. *Oke* ya, diberbagai daerah, sepakat ya, kita ketok ya, gimana Pak.

**F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):**

Pimpinan, saya pikir di wilayah Republik Indonesia Pak, bukan di berbagai daerah.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke, di wilayah Republik Indonesia sip ya, setuju ya?

**(RAPAT:SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Iya masuk poin ke berapa *tuh?* 7 ya, tadi poin ke-6 ya, perasaan tadi 5 kok jadi 7, 6.

Komisi VII DPR RI meminta Kepala SKK Migas untuk menyampaikan jawaban tertulis paling telat 23 November 2022, setuju ya?

**(RAPAT:SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Oke, terakhir sebelum nanti Bapak sampaikan penutup, kata.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**



Pak Ketua, mungkin sebelum ditutup ini sudah semuanya ini, supaya kita sama aja. Yang di poin yang berkaitan dengan usulan revisi amandemen undang-undang RUU itu, apakah terbuka begitu aja dari sana ke kita, dari pemerintah ke kita atau inisiatif dari kita ke pemerintah.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Itu inisiatif dari kita Mbak.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Bisa ditambahkan kata inisiatif supaya kita *clear*, kalau kita saling tunggu nanti tidak ada yang datang-datang.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Balik lagi ke kesimpulan tadi, mana tadi kesimpulan.

Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Kepala SKK Migas agar revisi Undang-undang Migas segera, revisi Undang-Undang Migas yang akan menjadi inisiatif DPR RI segera diselesaikan selambat-lambatnya Bulan Juni 2023 sebagai payung hukum penguatan kelembagaan dan kepastian investasi hulu migas di Indonesia, setuju ya?

**(RAPAT:SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Sebelum nanti ditutup oleh Pak Kepala, akhir kata Pak saya ingin mengatakan, saya ingin menambahkan dua hal saja, Pak. Saya udah pernah menyampaikan ini sebetulnya, sepemahaman saya SKK Migas itu adalah sebuah institusi yang sifatnya teknis dan praktis.

Namun seiring dengan berjalannya waktu saya melihat SKK Migas menjelma menjadi perusahaan yang sangat birokrat, institusi yang sangat birokratis. Yang akhirnya menyebabkan langkah-langkah upaya untuk melakukan sebuah terobosan dalam konteks peningkatan produksi menjadi lemah karena sudah menjadi terlalu birokratis.

*Nah* mungkin melalui momentum rapat hari ini saya juga ingin ikut mengingatkan bahwa tolong itu sudah mulai dievaluasi kembali Pak, jadi sifat-sifat birokratis yang ada di SKK Migas harus segera dievaluasi di era kepemimpinan Bapak karena saya banyak sekali melihat, menjadi sangat birokratis dan bahkan kecenderungannya melempar tanggung jawab ke pihak-



pihak yang lainnya. Kalau memang seperti itu, lalu wajar kalau misalnya ada teriakan-teriakan dari teman-teman, ada kritikan-kritikan *nggak* perlu adanya SKK Migas.

Jadi hal-hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab operasi, tanggung jawab teknis dari SKK Migas sering sekali SKK Migas membuang kembali itu kepada, baik itu ke K3S-nya, baik *begitu* juga ke ESDM. Nah ini sering sekali terjadi, saya banyak sekali dengar laporan, apa-apanya saya pikir *enggak* perlu saya *breakdown* di sini karena nanti terkesannya jadi subjektif, yang penting semangatnya kurang lebih seperti itulah.

Jadi kalau memang itu sudah menjadi Tupoksi SKK Migas dalam konteks melakukan akselerasi di wilayah teknis dan operasi hulu Migas ya itu seharusnya diambil alih oleh SKK Migas dan sampai hari ini saya belum pernah melihat ada praktek hukum ataupun tindakan hukum kepada SKK Migas dalam konteks kebijakan-kebijakan.

Yang saya tahu permasalahan hukum di SKK Migas itu hanya 2 aja yaitu masalah TPPI dan masalah OTT Bank Mandiri ya itu Kepala SKK Migas kita dulu Pak Rudi Rubiandini dan kedua masalah TPPI. Tapi saya pikir TPPI itu bukan dalam konteks proses pengambilan kebijakan, tapi lebih kepada prosedural. Jadi kalau sampai saat ini saya belum ketemu. Jadi sebetulnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebetulnya oleh SKK Migas *gitu* aja Pak pesan-pesan saya.

Terima kasih, silakan Pak Dwi *closing statement*-nya Pak.

#### **KEPALA SKK MIGAS (DWI SUTJIPTO):**

Terima kasih Pak Pimpinan dan terima kasih Bapak-Ibu sekalian.

Pada RDP hari ini kami mendapat masukan-masukan yang cukup banyak dan kami akan berusaha untuk melaksanakan dengan usaha semaksimal mungkin untuk bisa melihat SKK Migas maupun hulu migas seperti yang diharapkan bersama dan upaya mencapai 1 juta barel *oil* per hari dan 12 *billion* kubik *feet* per hari gas.

Dan teman-teman semua disini lengkap, saya kira tadi apa yang disampaikan Pak Pimpinan mengenai kelambatan proses, kemudian mengenai tidak beraninya ngambil tanggung jawab saya kira menjadi catatan yang menarik buat kami dan kami akan tindak lanjuti nanti dan kami akan ingatkan seluruh pihak untuk bisa mengambil alih.

Sebenarnya salah satu program yang kita telah tetapkan *one door service policy* sebenarnya adalah mengambil tanggung jawab K3S-K3S menjadi urusan SKK Migas pada saat pengurusan-pengurusan perizinan maupun pembebasan lahan, tapi tentu saja proses perubahan ini membutuhkan waktu dan saya mohon maaf dan mudah-mudahan ke depan lebih baik.



Sekali lagi terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian, masukan-masukan dan arahan-arahnya.

Terima kasih.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL  
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Oleh karena itu, sekian terima kasih Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII dengan SKK Migas resmi kita tutup dan semoga ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk peningkatan dan optimalisasi produksi nasional kita.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.19 WIB)  
(KETOK PALU 3 KALI)**

a.n. Ketua Rapat  
SEKRETARIS RAPAT,

Dra. Nanik Herry Murti  
NIP.196505061994032002

